



PT Perusahaan Gas Negara Tbk

OPEN TO A SUSTAINABILITY WORLD

LAPORAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) 2019



OPEN TO A SUSTAINABILITY WORLD

After 55 years of experience in delivering clean and affordable energy, PGN continues to build a strong reputation as a company that embraces and works toward sustainability. In addition, we pursue growth by building on infrastructure, especially after we received the trust to serve as Pertamina's Gas Subholding in 2019.

For the purpose of sustainability, we invest time and effort in building successful partnership with customer, suppliers, as well as communities in Indonesia and abroad. We are dedicated to open to a sustainable world, record business-scale growth, and support improved environmental quality through development of the natural gas and energy business for all stakeholders.

DAFTAR ISI

01 2 IKHTISAR KINERJA PKBL

- 5 Program Kemitraan
- 5 Program Bina Lingkungan
- 7 Penghargaan
- 8 Peristiwa Penting

10 PENGANTAR DIREKTUR UTAMA

02 14 PENDAHULUAN

- 17 Kondisi Umum
- 19 Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 19 Kebijakan Umum PKBL
- 20 Program Kemitraan
- 20 Program Bina Lingkungan
- 21 Bantuan Bencana Alam
- 21 Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan
- 21 Bantuan Peningkatan Kesehatan
- 22 Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum
- 22 Bantuan Sarana Ibadah
- 23 Bantuan Pelestarian Alam
- 23 Bantuan Sosial untuk Pengentasan Kemiskinan
- 24 Arah Ke Depan
- 24 Struktur Organisasi
- 25 Visi dan Misi
- 25 Motto
- 25 Komitmen Pokok

03 26 PKBL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

- 32 Komitmen Pemerintah Terhadap Pencapaian Tujuan Keberlanjutan

04 34 PELAKSANAAN PROGRAM PKBL

- 37 Rencana dan Realisasi PKBL
- 37 Program Kemitraan
- 42 Program Bina Lingkungan

05 48 KERJASAMA PENYALURAN PKBL

- 51 Kerjasama Penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan sesama BUMN
- 51 Kerjasama Penyaluran dengan Instansi/Lembaga Lain
- 51 BUMN Hadir Untuk Negeri

06 60 TEMUAN AUDITOR DAN KEPUTUSAN RUPS

- 63 Nama Auditor/KAP, Temuan Auditor, Jenis Pemeriksaan, dan Opini selama 2 (dua) Tahun Terakhir
- 63 Tindak Lanjut Atas Temuan Auditor dan Temuan Auditor yang Belum Dilaksanakan Selama 2 (Dua) Tahun Terakhir
- 63 Tindak Lanjut Arahan RUPS, Kementerian BUMN, dan Dewan Komisaris/Pengawas atas PKBL
- 63 Penutup
- 63 Kesimpulan
- 65 Hal-hal yang Perlu Mendapatkan Perhatian Pemegang Saham
- 65 Hal-hal yang Perlu Mendapatkan Keputusan dalam RUPS

07 66 LAMPIRAN – LAMPIRAN

08 82 LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



01

IKHTISAR KINERJA PKBL

Menapak usia 55 tahun keberadaannya, PGN menunjukkan komitmennya yang tinggi untuk senantiasa mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) melalui realisasi beragam program PKBL maupun melalui perbaikan kinerja operasional.





PKBL dipandang sebagai wujud nyata kontribusi BUMN terhadap upaya yang dilaksanakan bersama-sama seluruh warga dunia lain dalam memastikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan kegiatan pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di sekitar daerah operasi Perusahaan. Oleh sebab itu, PKBL dipandang sebagai wujud nyata kontribusi BUMN terhadap upaya yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh warga dunia dalam memastikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Kebijakan dan pelaksanaan PKBL dalam tahun 2019 pada prinsipnya tidak berbeda dengan tahun sebelumnya yang telah melakukan beberapa penyesuaian sebagai landasan baru dalam pelaksanaan PKBL. Penyesuaian kebijakan PKBL yang dilakukan sejak tahun 2017 itu ditetapkan pada RUPS tahun 2017 dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/7/2017 tentang perubahan kedua PerMen BUMN No.PER-09/MBU/07/2015 mengenai Program PKBL.

Atas dasar itu, pelaksanaan Program PKBL 2019 lebih difokuskan pada pelaksanaan program Bina Lingkungan, sedangkan Program Kemitraan (PK) praktis dihentikan termasuk tidak ada lagi penyisihan dana baik dari operasional maupun dari laba tahun sebelumnya, begitu pula PGN tidak lagi melakukan kegiatan penyaluran dana PK kepada calon mitra binaan langsung selama tahun 2019. Namun demikian, kegiatan penagihan piutang kepada para Mitra Binaan terhadap dana pinjaman dari realisasi penyaluran ditahun-tahun sebelumnya, tetap dilakukan sesuai dengan prosedur.

PROGRAM KEMITRAAN

Sebagaimana disebutkan diatas, pelaksanaan Program Kemitraan selama tahun 2019 dipusatkan pada upaya monitoring dan mengintensifkan usaha pemulihan kualitas pinjaman pada mitra binaan yang memiliki status diragukan dan macet, baik mereka yang tergabung dalam kluster maupun individu.

Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan dana Program Kemitraan dari Kementerian BUMN agar lebih sesuai dengan tujuan program, PGN mengalihkan sebagian

besar portofolio kelolaan, terutama yang dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama salur BUMN, kepada BUMN Khusus.

Namun demikian, kami terus melanjutkan program pembinaan kepada mitra binaan yang masih berada dalam portofolio kelolaan dan berasal dari mekanisme penyaluran langsung, antara lain dengan mengikutsertakan mereka dalam pameran dan memberikan motivasi serta *sharing session* pengalaman dari mitra binaan yang telah berhasil mengembangkan usahanya.

Pada tahun 2015, PGN menghentikan sementara penyaluran dana Program Kemitraan. Hingga pada tahun 2019 sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN, PGN menyalurkan dana Program Kemitraannya melalui BUMN Khusus yang telah ditetapkan untuk menyalurkan dana Program Kemitraan BUMN yaitu PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (PerMen BUMN) Republik Indonesia No.S.822/MBU/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan PT PNM (Persero) sebagai BUMN Khusus.

Efektifitas Penyaluran Dana Program Kemitraan

Dengan tidak adanya penyisihan dan penyaluran dana Program Kemitraan sejak tahun 2016, maka kami tidak lagi melakukan pengukuran indeks Efektifitas Penyaluran Dana Program Kemitraan.

Kolektibilitas Pengembalian Pokok Pinjaman

Sejalan dengan tidak adanya penyaluran pinjaman, tingkat kolektibilitas pengembalian pun menurun menjadi 12,36% pada tahun 2019 (2018: 19,45%) yang dihitung dari pengembalian pinjaman mitra binaan lama.

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Realisasi penyaluran dana Program Bina Lingkungan selama tahun 2019 total berjumlah Rp89.330.935.565. Program ini berupa pemberian bantuan untuk masyarakat marginal di sekitar wilayah operasi yang signifikan dan daerah lainnya sesuai kebijakan perusahaan. Untuk meningkatkan efektivitas Program Bina Lingkungan, sebelum sebuah kegiatan diluncurkan, terlebih dahulu

dilakukan ekspose proposal oleh calon Mitra Kerja termasuk melakukan pemetaan masyarakat (*social mapping*) di sekitar aset strategis perusahaan.

Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan hasil *social mapping* tersebut, dengan harapan manfaat bantuan

lebih optimal dan lebih tepat sasaran. Disamping itu, melalui Program Bina Lingkungan, kami juga melaksanakan Program BUMN Hadir Untuk Negeri (BHUN), yang sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian BUMN.



PENGHARGAAN

4 Balkondes Awards 2019



Balkondes Terbaik, Balkondes Terbersih, Balkondes Tata Kelola Terbaik dan Balkondes Karyawan Terbaik (Borobudur, 24 September 2019).

Platinum Rank (Tingkat Asia)



Asia Sustainability Reporting Rating 2019 (Bali, 23 November 2019)

Penghargaan ESDM Siaga Bencana



Dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Jakarta, April 2019)

3 Award dalam CECT Sustainability Award 2019



Kategori Based on ISO 26000 (CSR Guidance), Project-Based CSR & Business Sustainability, Based on Overall Sustainability Performance (Jakarta, November 2019)

Penghargaan PROPER Hijau Stasiun Pagardewa



Ikhtisar Kinerja PKBL

Pendahuluan

PKBL dan Pembangunan Berkelanjutan

Pelaksanaan Program PKBL

Kerjasama Penyaluran PKBL

Temuan Auditor dan Keputusan RUPS

Lampiran - Lampiran

Laporan Auditor Independen

PERISTIWA PENTING

April 2019
Partisipasi Mitra Binaan PGN
Dalam Pameran Inacraft 2019
di JCC, Jakarta



Dalam rangka mendukung pengembangan usaha para mitra binaan PGN, kami tetap menyertakan para Mitra Binaan UKM tetap dilaksanakan melalui dana bina lingkungan berupa keikutsertaan mitra binaan pada International Handcraft Fair (Inacraft) di Jakarta. Tujuannya adalah agar dapat dengan mudah menarik konsumen untuk dapat memperoleh produk mitra binaan PGN.

Mei 2019
Donor Darah pekerja PGN di Medan,
Sumatera Utara; Pekanbaru,
Riau; Batam, Kepulauan Riau dan
Surabaya, Jawa Timur



Kegiatan donor darah yang dilakukan rutin oleh para pekerja PGN ini merupakan salah satu bentuk kepedulian PGN terhadap sesama dan sebagai bentuk kepedulian para pekerja PGN pada sektor kesehatan. Kegiatan ini rutin diadakan setiap tahun dan dihadiri oleh para pekerja PGN.

9 Mei 2019
Realisasi Pengalihan/Penyaluran
Dana Program Kemitraan Kepada
BUMN Khusus



Guna meningkatkan pengelolaan portofolio dana Program Kemitraan, PGN mengalihkan sebagian besar portofolio kelolaan, terutama yang dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama salur BUMN, kepada BUMN Khusus, senilai total Rp.177.974.635.344

Mei 2019 Berangkatkan 4.070 Orang Peserta Mudik Gratis PGN



Program yang rutin digelar PGN tersebut, tahun ini diikuti 4.070 orang peserta.

Kegiatan mudik gratis selalu digelar PGN untuk mempermudah masyarakat pulang ke kampung halamannya tanpa harus berebut tiket bus di terminal. Kegiatan ini sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan safari Ramadan PGN 2019.

Desember 2019 Perolehan PROPER Hijau untuk Stasiun Pagardewa



Sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 1049/MENLHK/SETJEN/PKL.4/12/2019 PGN mendapatkan PROPER Hijau untuk Stasiun Pagardewa dan PROPER Biru untuk 3 lokasi lainnya. Di samping itu, anak usaha PGN berhasil meraih PROPER Emas (penilaian tertinggi PROPER) yaitu Pertagas Eastern Java Area.

Oktober 2019 Penandatanganan MoU antara PT Kirana Megatara dengan koperasi binaan PGN



Penandatanganan MoU kerjasama penerimaan hasil perkebunan karet di Desa Pagardewa antara Koperasi Binaan PGN dengan PT Kirana Megatara Tbk

PENGANTAR DIREKTUR UTAMA



Kualitas hidup masyarakat yang memadai ditandai dengan tersedianya sandang dan pangan yang cukup, pendidikan yang memadai, kesehatan yang baik dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Pemegang Saham yang Terhormat,

Kembali kami menyampaikan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 2019. Laporan ini memuat kinerja PGN dalam melaksanakan program PKBL untuk periode tahun 2019. Melalui Laporan ini, Pemegang Saham dapat menilai, berapa jauh PGN telah melaksanakan kewajiban yang terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) selama tahun 2019.

Sebagaimana yang digariskan oleh pemerintah, pelaksanaan PKBL terdiri dari dua bagian pokok, pertama Program Kemitraan, dan kedua, Program Bina Lingkungan. Sesuai dengan kebijakan perusahaan dan arahan Pemegang Saham, sama seperti tahun sebelumnya, di tahun 2019 kami kembali tidak membentuk dana Program Kemitraan dan menyalurkannya kepada mitra binaan secara langsung. Namun demikian, di tahun 2019, kami menjalankan keputusan RUPS tahun 2018 lalu, yang mengamankan realisasi pengalihan pengelolaan portofolio Dana Kemitraan kepada BUMN Khusus sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (PerMen BUMN) Republik Indonesia No.S.822/MBU/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan PT PNM (Persero) sebagai BUMN Khusus.

Kami merealisasikan pengalihan portofolio Dana Kemitraan dimaksud, khususnya portofolio Dana Kemitraan yang berasal dari kerjasama Salur BUMN, total senilai Rp177.974.635.344 kepada BUMN Khusus pada tanggal 9 Mei 2019. Oleh karenanya saldo portofolio kelolaan dana Program Kemitraan pada akhir tahun 2019 berjumlah Rp9.322.251.000 atau berkurang 94,5% dari saldo tahun sebelumnya yang sebesar Rp181.854.219.608.

Kebijakan ini juga ditempuh sebagai respons atas terbitnya PerMen BUMN No.S.822/MBU/12/2018 tersebut yang salah satu tujuannya adalah agar pengelolaan portofolio dana Program Kemitraan bisa lebih efektif dan efisien dan memberi manfaat lebih optimal. Pengalihan dana tersebut juga membuat kami lebih dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kinerja kami dalam mengelola bisnis utama PGN.

Namun demikian, walaupun di tahun 2019 tidak ada transaksi penyaluran kredit, dan sebagian portofolio dana Program Kemitraan telah dialihkan, kami tetap melaksanakan program pembinaan UKM yang menjadi Mitra Binaan dari realisasi program penyaluran langsung, melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mereka dibidang manajemen dan pemasaran.

Untuk Program Bina Lingkungan, pada tahun 2019 dana yang tersedia adalah sebanyak Rp57.062.367.317 yang mayoritas berasal dari biaya operasi perusahaan. Jumlah ini meningkat 2,0% dari tahun sebelum sebesar Rp55.962.586.105. Disamping itu, untuk tahun 2019 kami juga menyiapkan dana TJSL yang berasal dari operasi perusahaan sebesar Rp39.800.000.000. Program TJSL ini dilakukan sesuai dengan amanat UU Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 Pasal 74.

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara, kami memiliki kewajiban untuk membantu Pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Kualitas hidup masyarakat yang memadai ditandai dengan tersedianya sandang dan pangan yang cukup, pendidikan yang memadai, kesehatan yang baik dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Kewajiban ini semuanya kami tunaikan melalui Program Bina Lingkungan dan TJSL.



Gigih Prakoso Soewarto
Direktur Utama



Dilo Seno Widagdo
Direktur Komersial



Desima E. Siahaan
Direktur SDM dan Umum

Program Bina Lingkungan dan TJSL ini kami laksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di sekitar daerah operasi PGN. Ragam kegiatan yang kami jalankan dengan dukungan dan Program Bina Lingkungan maupun TJSL meliputi kegiatan pada sektor: pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, sarana dan prasarana umum, bantuan bencana alam, pelestarian alam dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Dengan berbagai jenis kegiatan spesifik yang dijalankan tersebut PKBL dan TJSL dapat dipandang sebagai wujud nyata kontribusi PGN terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). SDGs merupakan program global yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).



Syahril Mukhtar
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis



Arie Nobelta Kaban
Direktur Keuangan



Redy Ferryanto
Direktur Infrastruktur dan Teknologi

Agar memberi manfaat yang optimal, kami terus berupaya menyempurnakan kualitas pengelolaan PKBL dan TJSJL secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan kondisi dan lingkungan bisnis. Kami melanjutkan program *social mapping* sebelum merealisasikan berbagai kegiatan spesifik dalam rangka meningkatkan manfaat program. Kami juga meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan pihak terkait termasuk dengan Pemerintah Daerah, akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi berbagai program, dengan tujuan yang sama, yakni optimalisasi manfaat pelaksanaan program.

Sebagai penutup, atas nama Direksi, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan bekerja keras dalam mendukung upaya peningkatan kinerja PKBL termasuk TJSJL di tahun 2019.

Jakarta, Maret 2020

Gigih Prakoso Soewarto
Direktur Utama

02

PENDAHULUAN

Kembali kami menyampaikan kinerja pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2019 kepada Pemegang Saham. Melalui laporan ini Pemegang Saham dapat menilai sampai sejauh mana PGN telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh PerMen BUMN No.PER-02/MBU/7/2017 tentang perubahan kedua PerMen BUMN No.PER-09/MBU/07/2015 mengenai Program PKBL.





Kami merealisasikan berbagai kegiatan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya mewujudkan misi PGN untuk “Meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kemandirian energi dan upaya konservasi lingkungan”.

Laporan Tahunan PKBL PGN tahun 2019 ini mencakup pelaksanaan kegiatan PKBL untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2019. Melalui laporan PKBL ini kami menyampaikan pelaksanaan dan laporan keuangan PKBL selama periode 2019, sebagai wujud pertanggungjawaban Perusahaan kepada pemegang saham. Kami menyusun Laporan PKBL PGN ini berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.

KONDISI UMUM

Komitmen PGN untuk terus berupa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat guna memajukan dan membangun Indonesia yang lebih baik terus dilakukan baik melalui penyediaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan maupun melalui pelaksanaan PKBL. Upaya mewujudkan komitmen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanah konstitusi, yaitu turut berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UU no.19/2003 pasal 2 ayat 1 huruf e.

Lebih dari sekedar menjalankan amanah Undang-undang, bagi PGN pelaksanaan beragam kegiatan dalam program PKBL menunjukkan tekad PGN dalam mendukung upaya Pemerintah memenuhi komitmen pencapaian beragam rumusan tujuan prakarsa pembangunan berkelanjutan skala global. Sebagaimana diketahui bersama, masyarakat global melalui PBB, sejak 2016 telah menyepakati untuk melaksanakan prakarsa global yang kemudian disebut Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* - SDGs) yang terdiri dari 17 rumusan Tujuan. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi prakarsa SDGs dimaksud dan telah menyusun serta merealisasikan berbagai rencana strategis tingkat nasional untuk mewujudkan prakarsa tersebut.

Sebagai agen pembangunan, PGN memiliki peran signifikan untuk turut serta mendukung pencapaian beragam rumusan tujuan dalam SDGs tersebut. Berbagai langkah strategis telah disusun dan dijalankan oleh PGN untuk berkontribusi mendukung pencapaian beragam rumusan tujuan dalam SDGs, antara lain melalui pelaksanaan PKBL.

Landasan Hukum

Realisasi beragam kegiatan dalam Program PKBL merupakan kebijakan strategis perusahaan yang pelaksanaannya mengacu pada berbagai peraturan, diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 06 Agustus 2007 Perihal Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang: Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 2012 Tanggal 4 April 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
6. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang: Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 20/MBU/2012 Tanggal 27 Desember 2013.
7. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang: Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2012 tanggal 1 Mei 2013.

8. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang: Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
9. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016, serta Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-02/MBU/7/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Perubahannya Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN.
10. Nota Dinas Nomor 024400.ND/HM.05/FIN/2016 tanggal 9 Juni 2016 Perihal Kebijakan terkait pelaksanaan PKBL.
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (PerMen BUMN) Republik Indonesia No.S.822/MBU/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan PT PNM (Persero) sebagai BUMN Khusus.

Realisasi Program

Sebagai program mandatori strategis yang juga memiliki pengaruh penting bagi eksistensi perusahaan di tengah masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, pengelolaan PKBL dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri yaitu Divisi Corporate Social Responsibility (CSR) yang berada dibawah kendali Direktur SDM dan Umum.

Divisi CSR PGN bertanggungjawab mengelola PKBL dengan pengertian bahwa Divisi CSR ini juga bertanggungjawab melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dana CSR berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu;

1. Saldo alokasi laba untuk PKBL
2. Biaya Perusahaan untuk BL & TJSL

Pada tahun 2019 dalam rangka mendukung upaya inisiatif Kementerian BUMN untuk mengoptimalisasikan dana PKBL yang berasal dari penyisihan laba perusahaan yang selama ini tertahan di BUMN Pembina, seperti terjadi di PGN, Perseroan menjalankan mekanisme penyaluran dana PKBL, khususnya dana Program Kemitraan sebagaimana diatur dalam PerMen BUMN RI No.S.822/MBU/12/2018 tentang Penetapan PT PNM (Persero) sebagai BUMN Khusus beserta SK Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN no. SK-03/D7.MBU/12/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Penyaluran Dana Program Kemitraan BUMN Melalui BUMN Khusus.

Sesuai dengan peraturan tersebut Perseroan kemudian menyalurkan saldo dana Program Kemitraan dimaksud dari portofolio program PKBL sebesar Rp177.974.635.344 kepada PT PMN sebagai BUMN Khusus, untuk kemudian disalurkan kepada UMK di wilayah operasi PGN.

Sebagai dampak penyaluran tersebut, saldo dana PKBL dari alokasi laba untuk Program Kemitraan tinggal menjadi sebesar Rp9.322.251.000.

Sementara itu, untuk tahun 2019, jumlah total penyaluran dana CSR yang direalisasikan adalah sebesar Rp89.330.935.565. Total dana tersebut berasal dari penyaluran dana Program Bina Lingkungan dari alokasi laba, sebesar Rp100.300.060, kemudian pelaksanaan penyaluran Program Bina Lingkungan yang berasal dari biaya perusahaan sebesar Rp52.130.263.238 serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebesar Rp37.100.372.267.

Dengan realisasi penyaluran tersebut, maka jumlah saldo dana PKBL yang tersedia per 31 Desember 2019, baik yang berasal dari alokasi laba maupun dari biaya perusahaan, setelah dikurangi beban yang masih harus dibayarkan senilai Rp65.600.000 adalah sebesar Rp16.748.382.812.

Penyesuaian Fokus pada Program Bina Lingkungan

Sejak 2017 telah dilakukan penyesuaian kebijakan PKBL yaitu lebih difokuskan pada pelaksanaan program Bina Lingkungan dan menghentikan penyaluran dana Program Kemitraan (PK) termasuk tidak ada lagi penyisihan dana untuk PK.

Penyaluran dana PK yang dilakukan pada tahun 2019 adalah sebagai respons Perusahaan terhadap Peraturan Menteri BUMN mengenai BUMN Khusus sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Program Bina Lingkungan 2019 sebagian besar dibiayai melalui saldo dana dari biaya perusahaan, ditambah dari sisa saldo alokasi laba. Program Bina Lingkungan (BL) yang dilaksanakan selama 2019 meliputi Program BUMN Hadir untuk Negeri (BHUN) dan Program BL di berbagai sektor, yaitu; bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan sarana & prasarana umum, bantuan sarana ibadah, pelestarian alam dan pengentasan kemiskinan.

Kami terus menjalin sinergi dengan BUMN lain serta pihak-pihak lainnya yang berkompeten dalam menjalankan program tersebut, sehingga efektifitas program dapat ditingkatkan dan sasaran program dapat dioptimalkan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian terkait lainnya.

Mengurai Masalah Piutang Macet

PGN tetap konsisten berupaya menyelesaikan masalah piutang bermasalah dari para binaan, baik yang disalurkan langsung maupun disalurkan melalui program BUMN Sinergi. Pendekatan yang kami lakukan adalah melakukan penelusuran akun-akun mitra binaan langsung melalui kerjasama erat dengan pihak bank penyalur. Kami juga menjalin kerja sama erat dengan mitra pelaksana BUMN Sinergi dalam melakukan penelusuran dan rekonsiliasi akun para mitra binaan dengan bank penyalur.

Konsistensi upaya bersama dengan bank maupun mitra BUMN sinergi tersebut, termasuk dalam menjalankan upaya penagihan secara intensif, memberi hasil dengan kembali menurunnya *outstanding* pinjaman bermasalah. Jumlah piutang macet per 31 Desember 2019 kembali mengalami penurunan menjadi Rp160.510.098.148 dari Rp162.279.183.474 di tahun 2018.

UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dari 17 rumusan tujuan dalam konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), melalui PKBL kami mendukung penuh upaya pencapaian 7 butir rumusan tujuan tersebut, yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan
Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun
2. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat di segala usia.
3. Pendidikan Berkualitas
Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang.
4. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak
Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, produktif serta menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua.
5. Mengurangi Kesenjangan
Mengurangi kesenjangan di dalam sebuah negara maupun diantara negara-negara di dunia.
6. Keberlanjutan Kota dan Komunitas
Membangun kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, berkualitas, berketahanan dan berkelanjutan.
7. Aksi Terhadap Iklim
Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

KEBIJAKAN UMUM PKBL

PGN memiliki Kebijakan Penyaluran bantuan CSR secara umum, kegiatan atau bantuan program yang dilaksanakan, harus selaras dengan pencapaian tujuan PGN, yakni :

1. Mendukung kepentingan bisnis eksisting Perusahaan
2. Mendukung kegiatan pengembangan bisnis perusahaan
3. Menjaga keamanan aset perusahaan Memberikan manfaat kepada *stakeholders*
4. Mendukung program Pemerintah

Sementara itu, dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan Program Kemitraan, dan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan pengelolaan dana Program Kemitraan, PGN merealisasikan satu langkah strategis, yakni merealisasikan kerjasama penyaluran dengan BUMN Khusus.

Langkah strategis terkait Program Kemitraan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri BUMN nomor Per-02/MBU/7/2017, PerMen BUMN RI No.S.822/MBU/12/2018 tentang Penetapan PT PNM (Persero) sebagai BUMN Khusus dan SK Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN no. SK-03/D7.MBU/12/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Penyaluran Dana Program Kemitraan BUMN Melalui BUMN Khusus.

Sebagai wujud realisasinya, PGN telah mengalihkan sebagian besar pengelolaan dana Program Kemitraan kepada BUMN khusus tersebut. PGN meyakini pengalihan pengelolaan tersebut akan membuat dana Program Kemitraan akan bergulir lebih cepat, sehingga akan memberi *benefit* yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama para mitra UMK binaan, maupun pihak terkait lainnya.

PROGRAM KEMITRAAN

Sesuai dengan kebijakan perusahaan sebagaimana telah disebutkan diatas, sejak tahun 2017 PGN fokus pada pelaksanaan program Bina Lingkungan, sedangkan untuk Program Kemitraan kami telah merealisasikan pengalihan sebagian besar portofolio kepada BUMN khusus, namun masih tetap mengupayakan pengelolaan sisa piutang secara optimal.

Pengelolaan Piutang Mitra Binaan

Kami mengupayakan pengelolaan sisa piutang secara intensif dengan cara:

1. Memberikan kode *virtual account* kepada mitra binaan.
2. Memonitor pembayaran angsuran melalui fasilitas *cash management system* (CMS) dari bank yang bisa dilihat secara *online*.
3. Melakukan konfirmasi melalui telepon.
4. Melakukan kunjungan langsung ke mitra binaan.
5. Melakukan konfirmasi dan penagihan piutang secara periodik.
6. Melakukan penjadwalan ulang cicilan *outstanding* pinjaman.

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Program Bina Lingkungan dijalankan sebagai program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus sebagai wujud kontribusi nyata PGN bagi upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam SDGs. Prioritas Penerima Program Bina Lingkungan adalah untuk masyarakat di sekitar wilayah operasional yang signifikan, selain masyarakat di wilayah lainnya sesuai kebijakan Pemerintah.

Penyaluran Dana

Jumlah penyaluran dana CSR 2019 adalah sebesar Rp89.330.935.565. Jumlah ini berasal dari:

Sumber dana Program	Jumlah (Rp)
Program Bina Lingkungan yang berasal dari alokasi laba Perusahaan	100.300.060
Program Bina Lingkungan yang berasal dari biaya Perusahaan	52.130.263.238
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari biaya Perusahaan	37.100.372.267
Total	89.330.935.565

Program Bina Lingkungan

Realisasi Program Bina Lingkungan dilaksanakan melalui beragam kegiatan dalam 7 (tujuh) pilar kegiatan utama yaitu:

1. Bantuan Korban Bencana Alam,
2. Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan,
3. Bantuan Sarana Kesehatan,
4. Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum,
5. Bantuan Sarana Ibadah dan
6. Bantuan Pelestarian Alam, dan
7. Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan.

BANTUAN BENCANA ALAM

Pada tahun 2019 kembali berbagai macam bencana alam menimpa Indonesia, menyebabkan jatuhnya korban jiwa, korban harta dan menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat di lokasi bencana. Untuk meringankan beban para korban dan menunjukkan empati yang mendalam, kami bergerak memberikan bantuan bagi para korban di berbagai lokasi kejadian bencana tersebut, diantaranya:

1. Bantuan Bencana Banjir di Konawe Sulawesi Tenggara
2. Perbaikan rumah korban bencana alam puting beliung di Kampung Lebak Sari, Bogor
3. Bantuan Bencana Gempa Bumi di Maluku Utara
4. Tanggap Bencana Gempa Bumi di Ambon
5. Bantuan penanggulangan Karhutla di Riau

BANTUAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN

Kami memberi perhatian besar dalam bidang pendidikan, dengan keyakinan bahwa melalui pendidikan, masyarakat akan dapat memutus “lingkaran kemiskinan” dan dapat berpartisipasi penuh untuk turut bersama-sama membangun bangsa. Kami mendukung kemajuan pendidikan dengan menyalurkan berbagai kegiatan bantuan pendidikan, antara lain:

1. Pembenahan Laboratorium Bahasa Institut Teknologi DEL
Salah satu bantuan PGN dalam sektor pendidikan adalah renovasi laboratorium bahasa Institut Teknologi Del di Sumatera Utara. Dengan adanya bantuan renovasi laboratorium bahasa ini diharapkan laboratorium tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar para mahasiswa di Institut Teknologi Del.
2. Renovasi Gedung Kantin MBA di SBM ITB
Bantuan PGN dalam sektor pendidikan lainnya adalah renovasi atau pembenahan gedung kantin yang merupakan tempat berinteraksi dan berkumpul mahasiswa MBA di SBM ITB. Kantin tersebut didukung dengan fasilitas jaringan internet nirkabel (*wifi*) yang cepat serta suasana kampus yang modern sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran mahasiswa MBA ITB.
3. Program Siswa Mengenal Nusantara (SMN)
Program Siswa Mengenal Nusantara (SMN) ini merupakan rangkaian dari program BUMN Hadir

Untuk Negeri (BHUN) dimana kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air sejak dini kepada siswa SMA/SMK/SLB. PGN sendiri menjalankan program SMN ini di Provinsi Bali dengan jumlah 25 siswa dari 9 Kabupaten. Salah satu aktivitas dari kegiatan ini adalah pertukaran pelajar antar siswa dari Provinsi Bali dan Provinsi Kalimantan Barat.

4. Program Leadership dan Innovation Camp
5. BUMN Goes to Campus: UNIKA Santo Thomas
6. PGN Mengajar SMAN 6 Yogyakarta dan beberapa SMA lainnya.

Kegiatan ini diisi dengan materi sosialisasi tentang BUMN di Indonesia dengan pemateri dari pekerja PGN yang terpilih. Acara ini memberikan wawasan baru bagi para siswa. Antusiasme mereka dibuktikan dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan saat acara berlangsung.

7. Program Siswa Mengenal Nusantara (SMN), yaitu suatu kegiatan pertukaran kunjungan antar pelajar SMA/SMK/SLB ke berbagai provinsi di Indonesia yang dikunjungi agar saling mengenal budaya, potensi perekonomian maupun potensi wisata selain menanamkan semangat cinta tanah air dan memupuk wawasan kebangsaan generasi muda Indonesia.

BANTUAN PENINGKATAN KESEHATAN

Aspek Kesehatan menjadi salah satu fokus tujuan pembangunan berkelanjutan dalam rumusan SDGs, yakni rumusan tujuan ke-3 “memastikan kehidupan yang sehat dan mengutamakan kesehatan di segala usia”. Oleh karenanya kami menjadikan bantuan sarana dan prasarana kesehatan sebagai salah satu fokus bantuan. Salah satunya melalui penyediaan layanan konsultasi kesehatan, kami pilih menjadi bentuk kontribusi PGN dalam menjawab tantangan kurangnya tenaga medis di Indonesia.

Dasar fokus kontribusi bantuan peningkatan kesehatan adalah rekaman data PBB tahun 2013 – 2018 yang menunjukkan bahwa paling tidak sekitar 40% Negara di dunia belum mampu menyediakan 10 tenaga dokter per 10.000 penduduk dan lebih dari 55% Negara di dunia memiliki kurang dari 40 suster dan tenaga bidan per 10.000 penduduk.

Untuk mendukung perbaikan layanan kesehatan tersebut, kami menyediakan bantuan kesehatan berupa antara lain:

1. Pelayanan kesehatan melalui Mobil Sehat di wilayah operasional PGN
Sebagai wujud kontribusi dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, PGN ikut berpartisipasi dengan mengadakan pelayanan kesehatan melalui mobil sehat terutama di wilayah operasional PGN. Pelayanan kesehatan ini meliputi penyuluhan kesehatan, pengobatan gratis dan pemeriksaan kesehatan bagi warga kurang mampu.
2. Kegiatan donor darah serempak oleh pekerja PGN di Jakarta, Medan, Pekanbaru.
3. Bantuan pusat kesehatan desa di Desa Binaan PGN
4. Pengadaan Mobil *Ambulance*
Mobil *ambulance* merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh lembaga, badan hukum, ataupun Yayasan dimana *ambulance* dapat meningkatkan dan menunjang kegiatan dalam penanganan kondisi darurat. Oleh karena itu, PGN turut serta menyalurkan bantuannya untuk pengadaan mobil *ambulance* di beberapa wilayah.

BANTUAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN/ATAU SARANA UMUM

Ketersediaan prasarana dan sarana umum merupakan salah satu prasyarat terciptanya kegiatan perekonomian yang kondusif dan berkesinambungan dan bagi terpenuhinya kualitas hidup minimal.

Data yang ada menunjukkan meningkatnya perekonomian Indonesia selama dua dekade tahun terakhir tidak serta merta dibarengi dengan penambahan akses air bersih. Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional mencatat, 33,4 juta penduduk di Indonesia mengalami kekurangan air bersih dan 99,7 juta jiwa kekurangan akses untuk ke fasilitas sanitasi yang baik.

Data tersebut berarti menunjukkan presentase pemenuhan akses air bersih di Indonesia baru berada di kisaran 72,6% total jumlah penduduk. Sementara target SDG's menetapkan aksesibilitas sebesar 100%.

Oleh karenanya, bantuan akses sarana air bersih menjadi salah satu fokus penyaluran dana bantuan TJSL PGN selain beberapa sarana lainnya seperti:

1. Bantuan Sarana Air Bersih
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang membutuhkan, PGN juga membantu pengadaan atau penyaluran air bersih di beberapa wilayah, contohnya pada beberapa desa di Tangerang dan di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemberian Bantuan Mobil Pelayanan SKCK Keliling kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya
3. Pembangunan Pabrik serta Bantuan Mesin Pellet Cibogo, Bandung
PGN memberikan bantuan kepada masyarakat desa Cibogo yaitu dengan membangun fasilitas pabrik pelletisasi kotoran sapi dengan kapasitas 400 kg/jam. Program ini juga merupakan program kerja untuk memenuhi pelletisasi di Kecamatan Lembang. Jika pabrik ini sudah terbukti kelayakannya dan manfaatnya merata dan berkelanjutan untuk masyarakat Cibogo, maka dapat dikembangkan untuk wilayah di luar Cibogo.

BANTUAN SARANA IBADAH

Keberadaan sarana ibadah yang memadai dan kelancaran kegiatan keagamaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di bidang mental spiritual dan kesehatan jiwa. Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization atau WHO) mendefinisikan kesehatan jiwa sebagai “ketika seseorang tersebut merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup serta dapat menerima orang lain sebagaimana seharusnya serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain”.

Untuk mendukung tercapainya kondisi tersebut, PGN menggelar sejumlah kegiatan perbaikan sarana ibadah dan bantuan-bantuan lainnya terkait kesehatan spiritual. Hal ini diharapkan akan berdampak pada kesehatan mental masyarakat melalui penyaluran bantuan, di antaranya:

1. Renovasi Sarana Ibadah Masjid, Gereja dan Pura
Sebagai bentuk kepedulian PGN dalam aktivitas keagamaan masyarakat, PGN ikut membantu dalam pembangunan atau pembenahan sarana ibadah untuk menunjang kegiatan beribadah masyarakat antara lain adalah renovasi masjid, gereja serta pura di beberapa wilayah.

2. Pemberian santunan anak yatim dan piatu pada peringatan Nuzulul Qur'an
Dalam rangka acara Nuzulul Qur'an PGN turut membantu memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan piatu beserta bantuan operasional pantinya.
3. Perayaan Hari Raya Keagamaan
Bantuan PGN dalam sektor sarana ibadah antara lain juga pada perayaan hari besar keagamaan. Contohnya adalah pemberian bantuan hewan qurban di sekitar wilayah operasi PGN, bantuan perayaan Natal untuk beberapa gereja serta perayaan Saraswati di Bali.

BANTUAN PELESTARIAN ALAM

Kelestarian Lingkungan menjadi salah satu fokus utama dalam rumusan SDGs, sehingga terdapat tidak kurang dari 6 rumusan tujuan pembangunan yang menyangkut perbaikan lingkungan, yakni: Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi yang layak), Tujuan 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan), Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab), Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 14 (Ekosistem Lautan) dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan).

Indonesia juga menjadikan aspek perbaikan kondisi lingkungan menjadi salah satu target Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karenanya, kami merealisasikan beragam kegiatan di bidang lingkungan sebagai wujud kontribusi PGN dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan tersebut, meliputi:

1. Pemanfaatan lahan kosong di bantaran sungai Ciliwung
Pemberian bantuan ini bertujuan untuk membantu pemanfaatan lahan kosong di Bantaran Sungai Ciliwung Bersama dengan Komandan Batalyon 811 Satuan Kopassus agar lahan tersebut menjadi lahan produktif untuk mendukung tugas pokok satuan serta membantu lingkungan sekitar
2. Bantuan Keanekaragaman hayati di Bedegung, Muara Enim, Sumatera Selatan
3. Pembuatan Arboretum di Pagardewa, Muara Enim, Sumatera Selatan
4. Revitalisasi Kanal Hutan Mangrove Desa Sriminosari, Lampung
5. Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di Desa Tembesi, Panaran

BANTUAN SOSIAL UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan global yang harus diatasi bersama, mengingat dampak kemiskinan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial suatu bangsa maupun suatu kawasan selain berpengaruh nyata bagi kelestarian dan kualitas lingkungan sekitarnya. Mengatasi masalah kemiskinan melibatkan berbagai aspek, mencakup kepastian perlindungan sosial, peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan akses ke layanan dasar, penyediaan sumber pendapatan dan pemanfaatan sumberdaya tersedia secara optimal.

Dimensi dampak maupun kebutuhan pelaksanaan program yang kompleks menyangkut berbagai aspek yang mencakup tidak hanya ekonomi tetapi juga kesehatan, pendidikan, akses penghidupan, dan lain sebagainya itulah yang membuat upaya pengentasan kemiskinan menjadi program bersama, dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak. Di Indonesia, pengentasan kemiskinan juga masih menjadi salah satu tantangan pembangunan utama mengingat jumlah penduduk miskin di negeri ini masih berkisar 24,79 juta orang (BPS, September 2019) atau 9,22% penduduk Indonesia.

Meski mengalami penurunan 0,88 juta dibanding September 2018, capaian tersebut tetap membuat kami konsisten menjalankan berbagai program bantuan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan-kegiatan berikut:

1. Program Pangan Murah
Kontribusi PGN dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat adalah melalui program Pangan Murah yang dilaksanakan di beberapa wilayah antara lain; Meulaboh (2.500 Penerima Manfaat), Pangandaran (3.000 Penerima Manfaat), Jombang (1.000 Penerima Manfaat), Bekasi (2.000 Penerima Manfaat), Bangli, Gianyar dan Denpasar (2.000 Penerima Manfaat). Pangan murah ini diikuti kurang lebih sebanyak 10.500 Penerima Manfaat.
2. Program Desa Binaan
Kami berkomitmen penuh untuk senantiasa menjaga keharmonisan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah *Offstake Station* PGN sehingga dengan ini dapat menciptakan masyarakat yang unggul dan berdaya saing. Melalui program Desa Binaan, diharapkan masyarakat di desa tersebut dapat menambah

kompetensinya, meningkatkan kegiatan ekonominya dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya.

Kami merealisasikan Program Desa Binaan di berbagai wilayah, diantaranya Desa Binaan Panaran dan Tambesi di Batam, Desa Binaan Pagardewa di Muara Enim, Desa Binaan Bojonegara, Serang dan Desa Binaan Labuan Maringgai di Lampung Timur.

ARAH KE DEPAN

Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan PKBL melalui realisasi berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat marginal, antara lain dengan menjalankan :

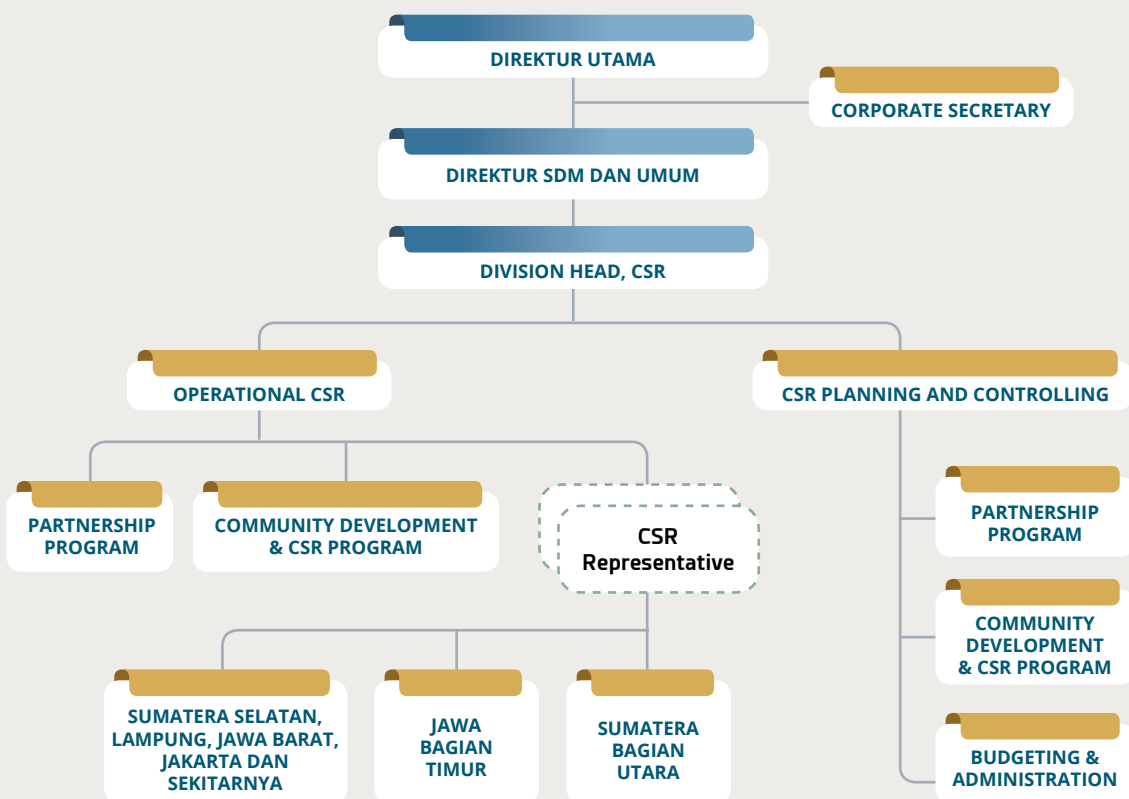
1. Penyempurnaan sistem dan prosedur serta sistem informasi PKBL sehingga pelaksanaan PKBL dapat kami lakukan dengan tepat, cepat, dan akurat.
2. Sinergi dengan BUMN serta pihak-pihak yang berkompeten, sehingga PKBL dapat kami laksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pelatihan bagi mitra binaan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penyaluran bantuan.
5. Peningkatan kompetensi bagi pengelola PKBL melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Menggiatkan kegiatan *monitoring* piutang sehingga meningkatkan kolektibilitas pengembalian pinjaman.
7. Menjaga hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 006100.K/OT.00/UT/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Struktur Organisasi President Director's Office, Strategy and Business Development Directorate and Human Capital and General Services Directorate PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan Surat Penugasan Division Head, Human Capital Management, struktur organisasi CSR Division adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI



VISI DAN MISI

VISI

Menjadi Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diakui secara nasional.

MISI

- Berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Berkontribusi secara aktif dalam mencerdaskan masyarakat, meningkatkan kesehatan, mengembangkan sarana umum/ ibadah, menjaga pelestarian alam dan membantu korban bencana alam

pgnshare

Motto



Komitmen Pokok

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > Berkontribusi terhadap peningkatan KESEJAHTERAAN masyarakat; > Menciptakan hubungan HARMONIS dengan <i>Stakeholder</i>; > Program kemitraan dan Program Bina Lingkungan | <p>yang berkelanjutan merupakan AMANAH;</p> <ul style="list-style-type: none"> > RESPONSIF terhadap masalah sosial masyarakat; > EMPATI terhadap masalah sosial masyarakat. |
|--|---|

03

PKBL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Melalui Laporan PKBL ini kami menunjukkan kontribusi nyata PGN dalam mendukung pencapaian berbagai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Kami merealisasikan beragam kegiatan PKBL yang selaras dengan rumusan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.





Program PKBL bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat marginal ke arah yang lebih baik dengan berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesehatan, memperbaiki pendidikan, menyediakan sarana dan prasarana umum, memberdayakan perekonomian masyarakat dan ikut serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan dalam menyelesaikan isu pemanasan global yang ternyata berkaitan erat dengan penyelesaian masalah kemiskinan, masalah sosial kemasyarakatan, ketimpangan pendapatan, kesetaraan hak dalam mengelola sumberdaya alam dan sebagainya membuat seluruh negara-negara di dunia dan masyarakat global kini membuat kesepakatan bersama, untuk bertindak bersama dan menyelesaikan masalah bersama tersebut.

Seperti diketahui bersama konsep tindakan bersama dalam membangun pertumbuhan ekonomi, masyarakat yang bermartabat sekaligus mampu menjaga lingkungan atau kini dikenal sebagai Pembangunan Berkelanjutan tersebut awalnya bernama *Millennium Development Goals* (MDGs). MDGs hanya mengikat beberapa negara maju di benua Amerika, Eropa dan Asia dalam menerapkan berbagai rencana dan konsep pembangunan ekonomi, masyarakat dan lingkungan terpadu dalam kurun waktu 2000-2015.

Evaluasi dari pelaksanaan MDGs kemudian menunjukkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan akan lebih dapat tercapai dengan efisien dan menjanjikan dengan

baik, jika seluruh komponen masyarakat global yakni seluruh negara, pelaku bisnis dan warga biasa, ikut terlibat dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan yang disepakati bersama. Untuk itulah sebelum masa MDGs berakhir, seluruh negara di dunia, melalui PBB merancang dan menyusun konsep pembangunan berkelanjutan yang kemudian dinamakan *Sustainable Development Goals/SDGs* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB). Konsep pembangunan berkelanjutan SDGs ini disepakati diterapkan pada periode 2015-2030.

Mayoritas negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, kini telah menyepakati dan bersama-sama menyatakan komitmennya dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan bersama untuk memastikan pencapaian rumusan tujuan dalam SDGs.

Rumusan tujuan pembangunan sebagai prakarsa masyarakat global dimaksud meliputi seluruh aspek dasar dalam prinsip keberlanjutan, yakni 5-P, *People, Planet, Partnership, Peace* dan *Prosperity*, yang kemudian dijabarkan kedalam 17 rumusan tujuan, sebagai berikut:



1. TANPA KEMISKINAN

Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

2. TANPA KELAPARAN

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.

3. KESEHATAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN

Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat di segala usia.

4. PENDIDIKAN BERKUALITAS

Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang.

5. KESETARAAN GENDER

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan anak perempuan.

6. AIR BERSIH DAN SANITASI

Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang.

8. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEKERJAAN YANG LAYAK

Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, produktif serta menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua.

9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.

10. MENGURANGI KESENJANGAN



Mengurangi kesenjangan di dalam sebuah Negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11. KEBERLANJUTAN KOTA DAN KOMUNITAS



Membangun kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, berkualitas, berketahanan dan berkelanjutan.

12. KONSUMSI DAN PRODUKSI BERTANGGUNG JAWAB



Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13. AKSI TERHADAP IKLIM



Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. KEHIDUPAN BAWAH LAUT



Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk pengembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15. KEHIDUPAN DI DARAT



Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggundulan hutan, menghentikan dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

16. INSTITUSI PERADILAN YANG KUAT DAN PERDAMAIAN



Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua pihak termasuk untuk lembaga, membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN



Memperkuat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN KEBERLANJUTAN

Indonesia sebagai anggota PBB, juga telah menyatakan komitmennya untuk menjalankan berbagai inisiatif strategis rencana pembangunan guna mendukung pencapaian target-target pembangunan dalam SDGs. Komitmen kuat Pemerintah Indonesia ini dinyatakan dalam Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang “Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”.

Melalui PerPres 59 tersebut seluruh jajaran Pemerintah, Pusat dan Daerah diharapkan dapat mensinergikan dan mengoptimalkan pengelolaan seluruh sumber daya yang dimiliki agar dapat mendukung tercapainya berbagai rumusan tujuan pembangunan dalam SDGs dengan efisien. PerPres 59 juga menegaskan perlu dirumuskannya Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB / SDGs) – RAN TPB, maupun Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB / SDGs) – RAD TPB, dokumen program dan rencana kerja pembangunan 5 (lima) tahunan untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs.

Sebagai bagian dari implementasi program RAN TPB dan RAN TPB tersebut, di tahun 2018, Kementerian Keuangan bahkan telah mendeklarasikan SDG Indonesia *One, platform* rencana kerja di bidang keuangan untuk mendukung pencapaian rumusan tujuan dalam TPB.

Sebagai agen pembangunan, PGN juga berkomitmen penuh mendukung beragam pencapaian tujuan pembangunan dalam SDGs tersebut. Komitmen ini antara lain dilaksanakan melalui pelaksanaan program PKBL.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PGN, memiliki keselarasan dengan berbagai rumusan tujuan dalam SDGs (*Global Goals*) tersebut, baik dari sisi pencapaian tujuan pada aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Program

Relevansinya dengan Tujuan SDGs

Program Kemitraan

- 1 - Tanpa Kemiskinan
- 8 - Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak
- 10 - Mengurangi Kesenjangan

Program Bina Lingkungan

- | | |
|---|---|
| • Bantuan Korban Bencana Alam | • 3 - Kesehatan dan Kesejahteraan |
| • Bantuan Pendidikan | • 4 - Pendidikan Berkualitas |
| • Bantuan Peningkatan Kesehatan | • 3 - Kesehatan dan Kesejahteraan |
| • Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum | • 11 - Keberlanjutan Kota dan Komunitas |
| • Bantuan sarana ibadah | • 11 - Keberlanjutan Kota dan Komunitas |
| • Bantuan pelestarian alam | • 13 - Aksi Terhadap Iklim |
| • Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan | • 1 - Tanpa Kemiskinan |

Melalui pelaksanaan program PKBL dapat dinilai sampai sejauh mana kontribusi PGN terhadap pencapaian TPB/SDGs. Program PKBL bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat marginal ke arah yang lebih baik dengan berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesehatan, memperbaiki pendidikan, menyediakan sarana dan prasarana umum, memberdayakan perekonomian masyarakat dan ikut serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.



04

PELAKSANAAN PROGRAM PKBL

Kami memfokuskan pelaksanaan PKBL tahun 2019 pada Program Bina Lingkungan dengan tujuan utama meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di sekitar area operasional, sementara untuk Program Kemitraan kami berfokus pada upaya optimasi pengelolaan melalui pengalihan sebagian besar portofolio pinjaman kepada badan usaha sesuai peraturan yang berlaku. Kami tetap melaksanakan pembinaan kepada mitra binaan yang lainnya.





Realisasi PKBL tahun 2019 dan ke depan akan semakin berfokus pada pelaksanaan Program Bina Lingkungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat, khususnya dibidang pendidikan. Mengingat sebagian besar portofolio dana Program Kemitraan sudah dialihkan ke BUMN Khusus, maka untuk Program Kemitraan kami akan lebih berfokus untuk meningkatkan kinerja mitra binaan yang masih ada dalam pengelolaan, dengan menjalankan program-program pelatihan, pembukaan pasar dan proses *collection*.

Pasca realisasi pengalihan sebagian besar portofolio Program Kemitraan ke BUMN Khusus, kami akan tetap menjalankan beberapa program pembinaan mitra binaan yang masih ada dalam kelolaan, menjalankan program pelatihan serta membantu membuka pasar produknya agar mereka mampu mandiri, mengembangkan wirausahanya dan mengembalikan dana pinjamannya.

Sementara itu, kami tetap berfokus merealisasikan beragam kegiatan dalam kerangka Program Bina Lingkungan dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupan sosial kemasyarakatan sekaligus mendukung upaya peningkatan kelestarian lingkungan sebagai wujud dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan.

RENCANA DAN REALISASI PKBL

PROGRAM KEMITRAAN

TABEL PROGRAM KEMITRAAN 2019

Jenis Bantuan	Tahun 2019		
	Rencana	Realisasi	% terhadap Rencana
(1)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)
Dana Tersedia:			
Saldo Awal	182.964.959.448	181.854.219.608	99,39%
Penyisihan laba dari BUMN Pembina	0	0	~
Pengembalian Pokok Pinjaman	6.766.664.004	3.126.408.671	46,20%
Pendapatan Jasa Adm	405.999.840	212.249.000	52,28%
Pendapatan Jasa Giro	1.426.032.175	1.151.100.459	80,72%
Angsuran Belum Teridentifikasi	0	0	~
Pendapatan lain-lain	0	952.908.606	~
Sub Jumlah	191.563.655.467	187.296.886.344	97,77%
Penggunaan Dana :	0	0	~
Penyaluran Pinjaman	182.500.000.000	177.974.635.344	97,52%
Dana Pembinaan	0	0	~
Beban Operasional dan Beban Administrasi	0	0	~
Biaya Lain-Lain	0	0	~
Sub Jumlah	182.500.000.000	177.974.635.344	97,52%

Dana yang tersedia untuk Program Kemitraan di Tahun 2019 terealisasi sebesar 97,7% dari rencana. Besaran realisasi pengembalian yaitu sebesar Rp3.126.408.671 atau 46,2% dan dari nilai yang direncanakan sepanjang tahun 2019. Kami terus mengupayakan penagihan pengembalian pokok pinjaman, terutama pembayaran pinjaman sinergi BUMN yang sampai dengan saat pelaporan ini diselesaikan belum dapat memenuhi kewajibannya sesuai jadwal dan nilai yang disepakati.

Realisasi Pendapatan Jasa Giro Kemitraan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.151.100.459 atau 80,7% dari rencana. Sementara itu, PGN juga mencatatkan Pendapatan Jasa Administrasi sebesar Rp212.249.000 atau sebesar 52,28% dari rencana.

Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran PKBL Tahun 2019, sampai dengan akhir tahun 2019 PGN tidak lagi menyalurkan dana Program Kemitraan untuk para Mitra Binaan secara langsung. Hal ini mengacu pada kebijakan perusahaan melalui Nota Dinas Nomor 024400.ND/HM.05/FIN/2016 tanggal 9 Juni 2016 Perihal Kebijakan terkait pelaksanaan PKBL.

Pada tahun 2019, mengacu pada ketentuan PerMen BUMN No.S.822/MBU/12/2018 tentang Penetapan PT PNM (Persero) sebagai BUMN Khusus, kami merealisasikan pengalihan pengelolaan sebagian besar portofolio Program Kemitraan, yakni portofolio mitra penyalur BUMN, kepada BUMN Khusus tersebut. Sisa portofolio Program Kemitraan dari skema penyaluran langsung, tetap dikelola oleh PGN.



Namun demikian, sekalipun penyaluran dananya sementara dihentikan dan sebagian telah dialihkan, program pembinaan mitra binaan dari sisa portofolio Program Kemitraan tetap dijalankan. Tujuannya adalah memberi kesempatan pada mitra binaan agar usaha yang mereka jalankan dapat berkembang pada saat kondisi eksternal yang mempengaruhi kemajuan usahanya, kembali membaik.

Kami mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/07/2017 pasal 9 ayat (1) point c.1 dan 2 “Beban Pembinaan: Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan

dengan Program Kemitraan”, dan “Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% dari dana Program Kemitraan”, dalam melaksanakan program pembinaan kepada mitra binaan tersebut.

Kami melaksanakan program Pembinaan UKM dengan dukungan dana Bina Lingkungan berupa keikutsertaan mitra binaan pada berbagai pameran, meliputi:

1. International Handcraft Trade Fair (Inacraft) di Jakarta;
2. Pameran Indonesia Festival 2019 di Seoul;
3. Indonesia Creative Product Festival (ICPF), Kuala Lumpur.



Nayla Craft

Nayla Craft merupakan produsen tas rajut di Kulon Progo, memiliki *showroom* yang cukup luas dan didukung oleh 25 pekerja sekitarnya untuk memproduksi dan menyediakan berbagai macam jenis kerajinan rajut dengan berbagai macam model. Produsen kerajinan rajut yang berlokasi di Karang RT 05 RW 03, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo ini juga memproduksi sepatu rajut, dompet, gantungan kunci, bros, topi dan bantal rajut. Selain dijual melalui *Showroom* Nayla Craft, produk-produk kerajinan rajut ini juga dikirim ke seluruh Indonesia.

Memulai usaha pada tahun 2010, Ibu Surti, pemilik Nayla Craft, menggandeng puluhan pengrajin tas rajut di Kulon Progo sehingga turut memajukan perekonomian Kulon Progo yang merupakan salah satu kabupaten tertinggal di bidang ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain turut serta membangun ekonomi warga sekitar Kulon Progo, Ibu Surti juga aktif memberikan pelatihan mengenai usaha membuat tas rajut, bahkan hingga keluar pulau Jawa, sehingga keahlian kerajinan rajutnya dapat ditularkan ke berbagai pihak, agar memberi manfaat untuk orang banyak. Pada awal berdirinya, Nayla Craft sebenarnya mengalami berbagai kendala usaha, terutama dari sisi permodalan dan media promosi usaha. Baru setelah bertemu dengan PGN, di tahun 2012, kendala permodalan dan pemasaran tersebut dapat diatasi. Melalui Program Kemitraan, Nayla Craft mendapatkan dukungan permodalan, pelatihan kewirausahaan dan terutama, perluasan pasar. Nayla Craft cukup aktif diikuti dalam berbagai pameran di dalam maupun luar negeri, sehingga produknya makin dikenal. Kini Nayla Craft bisa lebih memfokuskan pengembangan usahanya melalui penciptaan inovasi produk-produk baru untuk dijual.

Testimoni Nayla Craft

"PGN selalu memberikan ruang agar kami dapat mempromosikan produk kami baik di dalam dan di luar negeri. Hingga alhamdulillah, saat ini omset kami selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Selain dukungan permodalan dan fasilitas pameran kami juga diberikan berbagai pelatihan berharga, seperti: pelatihan *management*, *e-commerce* dan pelatihan dalam mengelola bisnis. Tidak kalah penting nya kami juga bisa bersilaturahmi dengan anggota PGN yang lain yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Melalui silaturahmi tersebut kami bisa saling mendukung dengan ikut mempromosikan produk kami ke pihak lain. Kami berharap kerjasama dengan PGN dapat terus berjalan, mengingat berkat dukungan PGN lah, Nayla Craft kini dapat terus berkembang sesuai dengan impian kami".



Produk kerajinan rajut Nayla Craft.



Bu Surti dengan salah satu pelanggan Nayla Craft.



Produk Nayla Craft di pameran Inacraft 2019.



Bu Surti dengan produk-produknya.

KOLEKTIBILITAS PENGEMBALIAN PINJAMAN PROGRAM KEMITRAAN TAHUN 2019, 2018, 2017

TAHUN 2019

Kategori	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Nilai Tertimbang (Rp)
Lancar	1.835.646.451	0,07%	1.834.347.118
Kurang Lancar	-	3,44%	-
Diragukan	-	17,68%	-
Macet	13.003.933.958	100,00%	-
Jumlah	14.839.580.409		1.834.347.118
Rasio Kolektibilitas		12,36%	
Skor		2	

TAHUN 2018

Kategori	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Nilai Tertimbang (Rp)
Lancar	3.472.221.455	93,10%	3.232.589.350
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	35.500.000	67,96%	24.125.823
Macet	13.238.562.553	0,00%	-
Jumlah	16.746.284.008		3.256.715.173
Rasio Kolektibilitas		19,45%	
Skor		1	

TAHUN 2017

Kategori	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Nilai Tertimbang (Rp)
Lancar	5.365.259.293	95,22%	5.108.858.981
Kurang Lancar	57.202.000	88,80%	50.795.760
Diragukan	8.761.874.650	68,60%	6.010.492.707
Macet	5.920.288.112	0,00%	-
Jumlah	20.104.624.055		11.170.147.448
Rasio Kolektibilitas		55,56%	
Skor		2	



PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Kami menjalankan Program Bina Lingkungan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat marginal terutama di sekitar daerah operasi perusahaan. Program ini kami laksanakan dalam bentuk berbagai sub program sebagai wujud kontribusi PGN dalam mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan dalam SDGs. Dalam kaitan ini Program Bina Lingkungan berkontribusi terhadap 5 (lima) SDGs, yaitu:

1. SDGs 3 - Kesehatan yang baik dan kesejahteraan.
"Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat di segala usia", selaras dengan pelaksanaan paket kegiatan "Bantuan Peningkatan Kesehatan".
2. SDGS 4 – Pendidikan Berkualitas.
"Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang", selaras dengan pelaksanaan paket kegiatan "Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan".
3. SDGS 11 - Keberlanjutan Kota dan Komunitas.
"Membangun kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, berkualitas, berketahanan dan berkelanjutan", selaras dengan pelaksanaan paket kegiatan "Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum".

4. SDGS 10 – Mengurangi Kesenjangan.

"Mengurangi kesenjangan antar kawasan di dalam sebuah negara maupun diantara negara-negara di dunia".

Hal ini selaras dengan tujuan umum dari pelaksanaan program PKBL itu sendiri yang menegaskan adanya kesetaraan pembangunan dan hilangnya kesenjangan kesejahteraan diantara masyarakat melalui pelaksanaan PKBL.

5. SDGS 13 - Aksi Terhadap Iklim.

"Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya", selaras dengan pelaksanaan paket kegiatan "Pelestarian Alam".

PGN berkomitmen penuh untuk terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan Program Bina Lingkungan melalui berbagai kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan perekonomian rakyat, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan. Kami bertekad menjalankan program sebaik-baiknya dan berupaya mengalokasikan anggaran yang lebih besar dengan mengacu kepada amanah Perundangan dan Peraturan Menteri BUMN yang menjadi dasar pelaksanaan PKBL.

Untuk itu, sekalipun tidak lagi mengalokasikan sebagian labanya untuk mendukung pelaksanaan program PKBL, sesuai kebijakan dan peraturan yang ada, PGN menyediakan dan merealisasikan sejumlah dana yang memadai untuk mensukseskan berbagai kegiatan dalam kerangka Bina Lingkungan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan maupun dalam kerangka PKBL, sebagaimana tergambar melalui beberapa tabel berikut:

PROGRAM BINA LINGKUNGAN (PENYISIHAN LABA) TAHUN 2019

Jenis Bantuan	Tahun 2019		
	Rencana	Realisasi	% terhadap Rencana
(1)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)
Bantuan Korban Bencana Alam	0	0	~
Bantuan Pendidikan Dan/Atau Pelatihan	0	90.000.000	~
Bantuan Peningkatan Kesehatan	0	10.000.000	~
Bantuan Pengembangan Prasarana Dan/Atau Sarana Umum	0	300.060	~
Bantuan Sarana Ibadah	0	0	~
Bantuan Pelestarian Alam	0	0	~
Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan	0	0	~
Bantuan Pembinaan MB	0	0	~
Sub Jumlah	0	100.300.060	~
BUMN Peduli	0	0	~
Jumlah	0	100.300.060	~

PROGRAM BINA LINGKUNGAN (BIAYA PERUSAHAAN) TAHUN 2019

Jenis Bantuan	Tahun 2019		
	Rencana Rp	Realisasi Rp	% terhadap Rencana
(1)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)
Bantuan Korban Bencana Alam	2.670.603.839	1.835.656.692	68,74
Bantuan Pendidikan Dan/Atau Pelatihan	18.883.497.499	18.512.575.241	98,04
Bantuan Peningkatan Kesehatan	28.585.603.849	26.071.348.761	91,20
Bantuan Pengembangan Prasarana Dan/Atau Sarana Umum	12.820.603.849	10.422.897.642	81,30
Bantuan Sarana Ibadah	21.348.103.849	20.858.054.429	97,70
Bantuan Pelestarian Alam	1.467.603.849	1.174.051.411	80,00
Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan	10.877.363.902	10.456.351.389	96,13
Bantuan Pembinaan MB	0	0	~
Sub Jumlah	96.653.380.636	89.330.935.565	92,42
BUMN Peduli	0	0	~
Jumlah	96.653.380.636	89.330.935.565	92,42

PROGRAM BINA LINGKUNGAN UNGGULAN

Menindaklanjuti impian untuk bisa menjadikan desa-desa di sekitar wilayah operasional menjadi desa yang maju dan mandiri, sehingga mampu menunjang pembangunan berkelanjutan di Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), merealisasikan Program Desa Binaan. Program ini direalisasikan di area-area dimana terletak 5 *Offtake Station* (Stasiun Gas PGN) yang merupakan objek vital nasional dan memiliki peranan strategis dalam menjaga stabilitas pasokan energi di Indonesia, sehingga keharmonisan antara PGN dan masyarakat setempat untuk menjaga lokasi tersebut merupakan suatu keharusan.

Program Desa Binaan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: *Social* dan *Stakeholder Mapping*, Survei ke *Stakeholder* PGN di sekitar lokasi, Perencanaan Program, Implementasi Program, *Monitoring* dan Evaluasi Program, *Exit Strategy* (Penyerahan Program kepada Kelompok Masyarakat). Keseluruhan tahap tersebut melibatkan masyarakat dan aparat pemerintah setempat, sehingga program-program yang dihasilkan merupakan kesepakatan bersama antara pihak PGN dan masyarakat. Dalam rangka mendorong kemandirian desa, maka di setiap desa diupayakan realisasi pembentukan kelembagaan masyarakat berupa BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) maupun kelembagaan lain, dengan berbagai unit usaha masyarakat di bawahnya.

PGN selalu berusaha menciptakan program yang mampu memberikan *benefit* berkelanjutan, baik untuk masyarakat maupun untuk perusahaan. *Benefit* yang diharapkan tumbuh dari realisasi Program Desa Binaan PGN ini adalah:

1. Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
2. Menciptakan peluang kerja dan mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut.
3. Meningkatkan kesadaran dan kualitas kesehatan masyarakat setempat.
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
5. Meningkatkan keharmonisan hubungan antara PGN dengan Masyarakat dan Pemerintah setempat, maupun antar masyarakat itu sendiri.
6. Mengurangi gangguan operasional bagi perusahaan yang disebabkan aspek sosial.
7. Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari perusahaan, sehingga dana bantuan bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat di tempat lain.
8. Menjadi media keterlibatan pekerjaan PGN dalam kegiatan sosial perusahaan.
9. Menjadi media sosialisasi peran serta BUMN dan PGN dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Program Desa Binaan Dusun IV Pagardewa, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan

Pada pelaksanaan Program Desa Binaan di wilayah ini, PGN merealisasikan berbagai kegiatan pembinaan, meliputi:

1. BUMDes Pagardewa

Untuk meningkatkan taraf hidup dan membangun perekonomian masyarakat di wilayah operasi PGN melalui program Desa Binaan, CSR PGN membina masyarakat dengan membentuk lembaga masyarakat desa berupa BUMDes. Pembentukan BUMDes ini, salah satunya direalisasikan di Dusun IV Pagardewa, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Suatu desa yang secara geografis letaknya berdekatan dengan aset/wilayah operasi PGN, yaitu Stasiun Kompresor Pagardewa, sehingga kini menjadi desa yang maju dan mandiri serta mampu menunjang pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

CSR PGN selalu berusaha untuk menciptakan program-program yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat, pemerintah daerah maupun perusahaan. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui program BUMDes ini, berbagai kegiatan yang dilakukan terbukti dapat memberikan berbagai manfaat kepada masyarakat setempat. Selain taraf hidup mereka meningkat berkat berkembangnya perekonomian setempat, lingkungan sosial kemasyarakatan sekitar juga dirasakan semakin membaik.

Hal ini karena melalui program BUMDes tersebut, masyarakat merasa turut berperan serta dan berusaha saling mendukung semaksimal mungkin agar setiap program memberi hasil terbaik, sehingga kelak mereka dapat merasakan manfaat program dengan maksimal.

Testimoni masyarakat

“Program BUMDes sangat baik dan bagus sekali untuk diaplikasikan di desa, terutama di Dusun IV Pagardewa, karena dengan begitu masyarakat dapat lebih memacu kreatifitas dalam segala bidang usaha dengan didukung oleh pendampingan BUMDes, sehingga masyarakat dapat terukur dalam usaha dan lebih terjamin.”

Program Desa Binaan Dusun IV Pagardewa, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan

2. Koperasi Paderta Arto Mulyo – Koperasi Binaan PGN

Berdasarkan hasil *survey* di desa Pagardewa yang menunjukkan bahwa rata-rata mata pencaharian masyarakat di desa tersebut adalah dengan menjadi petani karet, maka salah satu program CSR yang masuk dalam Program Desa Binaan adalah pembentukan Koperasi Karet.

Koperasi Karet dapat membantu para petani karet sekitar Pagardewa meningkatkan taraf hidupnya, mengingat melalui koperasi tersebut, para petani bisa mendapatkan harga jual karet sesuai dengan harga pasar. Untuk itu, pada tanggal 16 Oktober 2019, telah dilaksanakan penandatanganan MoU kerjasama penerimaan hasil perkebunan karet di Desa Pagardewa antara Koperasi Binaan PGN dengan PT Kirana Megatara Tbk.

Dengan terealisasinya program ini, kini dan ke depan penjualan hasil karet masyarakat menjadi lebih terjamin, dan menghindarkan mereka dari jeratan para tengkulak. Selain itu, masyarakat juga bisa menjadi lebih produktif, mengingat selain mendapatkan kepastian penjualan karet, para petani juga diberikan pelatihan pengelolaan kebun karet yang baik dan berdayaguna.

Program pembentukan Koperasi Binaan PGN ini mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat sekitar. Berbekal antusiasme yang besar itu, diharapkan Koperasi Paderta Arto Mulyo dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, kerjasama penerimaan hasil perkebunan karet juga dapat berjalan dengan baik sehingga kesejahteraan seluruh masyarakat Desa Pagardewa juga semakin meningkat.



Kunjungan CSR PGN ke Koperasi Padetra Arto Mulyo.



Penandatanganan MoU antara PT Kirana Megatara dengan koperasi binaan PGN.

Testimoni masyarakat

“Program Koperasi Karet dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya di Dusun IV Pagardewa ini sebagai suatu program yang sangat bermanfaat dan dapat meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat melalui penjualan hasil perkebunan karet. Tidak hanya itu saja, masyarakat juga diberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai pengelolaan karet yang baik dan benar sehingga hasil yang dicapai diharapkan semakin meningkat.”

3. Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam

Program lain yang direalisasikan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitar desa binaan PGN adalah pembentukan Koperasi Simpan Pinjam. Melalui keberadaan koperasi ini, para ibu ibu-ibu di desa Pagardewa akan dapat ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pembukaan usaha dengan modal mandiri hasil gotong royong dan terhindar dari jeratan para rentenir. Selain untuk modal usaha, pinjaman dari koperasi dapat digunakan untuk menutupi keperluan yang sangat mendesak.

Masyarakat, khususnya kaum ibu-ibu sangat antusias menyambut kehadiran Koperasi Simpan Pinjam ini, sebagaimana tampak dari meningkatnya jumlah anggota dari 20 orang, menjadi 38 orang dalam waktu singkat. Kami meyakini jumlah anggota akan terus meningkat dimasa mendatang.

Testimoni masyarakat

“Program Koperasi simpan pinjam ini sangat bermanfaat, selain menjadi masyarakat guyub, juga mudah untuk mendapatkan permodalan dan kita jadinya tidak meminjam ke rentenir lagi”.

4. Bank Sampah

Program Bank Sampah sangat dirasakan membantu masyarakat sekitar Pagardewa dalam menjaga lingkungan rumah agar senantiasa tampak bersih dan sehat selain dapat mengurangi potensi penyebaran penyakit. Program bank sampah juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari hasil penjualan sampah non-organik ke bank sampah.

‘Memberikan manfaat kepada *stakeholders*’ dan ‘Menjaga keamanan aset perusahaan’. Mengingat melalui program ini, banyak manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar. Sebagaimana diketahui bersama, masyarakat sekitar juga merupakan *stakeholders* perusahaan. Dengan tingginya rasa memiliki masyarakat terhadap area sekitar kegiatan operasional perusahaan, maka diharapkan mereka akan ikut serta menjaga keamanan aset perusahaan.

Kegiatan ini juga direalisasikan dalam rangka mendukung kebijakan Bidang CSR yaitu



Gedung Bank Sampah Desa Pagardewa.



Kegiatan *monitoring* yang dilakukan oleh pihak PT PGN di desa binaan Pagardewa.

Testimoni masyarakat

“Program Bank Sampah ini membantu kita dalam merubah paradigma tentang sampah. Ternyata sampah apabila dikumpulkan dan dikelola dengan baik melalui menabung sampah, selain membuat lingkungan menjadi bersih, juga bisa mendatangkan penghasilan”.

05

KERJASAMA PENYALURAN PKBL

Kami mengoptimalkan realisasi kerjasama penyaluran PKBL dengan berbagai lembaga yang berkompeten dengan tujuan meningkatnya *benefit* bagi masyarakat sekitar sebagai penerima manfaat program.







BUMN turut hadir sebagai bagian dari pembangunan Indonesia baik secara langsung melalui keterlibatan dalam proyek-proyek strategis nasional maupun secara tidak langsung melalui kontribusi penerimaan negara seperti setoran dividen, setoran pajak maupun melalui Penerimaan bukan Pajak Lainnya yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat.

KERJASAMA PENYALURAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DENGAN SESAMA BUMN

Selama Tahun 2019, PGN tetap menjalin sinergi dengan BUMN lain dalam merealisasikan Program Bina Lingkungan, dengan mengelola biaya perusahaan. PGN merealisasikan penyaluran dana pada Sektor Pendidikan dengan PT. Balai Pustaka (Persero) di Bali melalui Program BUMN Hadir Untuk Negeri (BHUN) yang diadakan di Provinsi Bali. Adapun penyaluran pada sektor pendidikan lainnya dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT. Semen Padang yakni dengan Peningkatan Fasilitas Pendukung Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Sementara kerjasama antar sesama BUMN yang paling substansial adalah pada pelaksanaan Program Kemitraan, yakni saat PGN mengalihkan pengelolaan sebagian besar portofolio aset Mitra Binaan dari program kerjasama penyaluran dalam kerangka Sinergi BUMN sebelumnya, ke BUMN Khusus, yakni PT PMN, sesuai ketentuan PerMen BUMN No.S.822/MBU/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan PT PNM (Persero) sebagai BUMN Khusus. Total pengalihan dana PK yang direalisasikan adalah sebesar Rp177,97 miliar, seperti telah disinggung di Bab 4 Pelaksanaan Program PKBL. Dengan terealisasinya pengalihan tersebut, maka sisa portofolio kelolaan Program Kemitraan PGN adalah sebesar Rp9,32 miliar.

KERJASAMA PENYALURAN DENGAN INSTANSI/ LEMBAGA LAIN

Untuk Program Bina Lingkungan selama Tahun 2019, PGN merealisasikan program di berbagai bidang kegiatan, bekerjasama dengan:

1. Rumah Zakat
Kegiatan Aksi Mobil Sehat di Wilayah Pandeglang Provinsi Banten.
2. *Center for Entrepreneurship, Change and Third Sector* (CECT) Trisakti University Pendampingan Desa Binaan Panaran dan Pagardewa.

BUMN HADIR UNTUK NEGERI

BUMN Hadir Untuk Negeri (BUHN), merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan dengan melibatkan hampir seluruh BUMN di Indonesia dengan kinerja yang mumpuni. Di tahun 2019, kegiatan BUHN ini kembali digelar dengan melibatkan 37 BUMN besar dan dibagi kedalam beberapa kelompok pelaksana sesuai Provinsi yang telah ditetapkan. PGN mengelola kegiatan yang difokuskan di Bali, bersama-sama dengan Kimia Farma, Inna Hotels & Resorts dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Dasar Hukum Pelaksanaan.

1. Surat Menteri BUMN Nomor S-195/ MBU / 04 / 2019 tanggal 01 April 2019 Perihal Program BUMN Hadir Untuk Negeri (BHUN) Tahun 2019.
2. Surat Menteri BUMN Nomor S-245/MBU/D7/04/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal Perubahan PIC dan Co-PIC Pelaksanaan BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2019.
3. Surat Menteri BUMN Nomor S-728/D7/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 Perihal Perubahan TOR (*Term of Reference*) BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2019.
4. Surat MenSesNeg RI Nomor B-779/M.Sesneg/Set/ TU.00.04/07/2019 tanggal 23 Juli 2019 Perihal Penyampaian Penyempurnaan Tema Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019

Latar Belakang dan Tema Kegiatan

Sebagai Negeri yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa, agama dengan ribuan pulau, Indonesia telah membuktikan kekayaannya. Berbagai keanekaragaman itulah sepatutnya disyukuri dan menjadikan masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke bersatu dan menjaga keutuhan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika.

BUMN turut hadir sebagai bagian dari pembangunan Indonesia baik secara langsung melalui keterlibatan dalam proyek-proyek strategis nasional maupun secara tidak langsung melalui kontribusi penerimaan negara seperti setoran dividen, setoran pajak maupun melalui Penerimaan bukan Pajak Lainnya yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat.



Upacara HUT RI ke 74 bersama masyarakat sebagai wujud nyata peran BUMN di masyarakat.

BUMN Hadir Untuk Negeri bertujuan untuk menciptakan kondisi dan mendorong agar BUMN di Indonesia dapat memberikan sumbangan yang terbaik bagi negeri dan rakyat Indonesia. Kementerian BUMN dan BUMN sebagai bagian dari masyarakat bernegara, telah melaksanakan program “BUMN Hadir Untuk Negeri” secara

berkesinambungan sejak tahun 2015. Sebagai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan dan memupuk rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia kepada seluruh masyarakat di seluruh pelosok Negeri, Kementerian BUMN dan BUMN kembali mewujudkan “BUMN Hadir Untuk Negeri” pada tahun 2019.



PGN bekerja sama dengan Kodam IX / Udayana melaksanakan kegiatan Pasar Murah berupa paket sembako sebanyak 2.000 Paket yang didistribusikan berdampingan dengan kegiatan Udayana Run 5K dan 10K, pada 18 Agustus 2019 di area Pantai Kuta, Badung, Bali.



Jalan Sehat dengan route 5 km di area ITDC, diikuti oleh 1.285 peserta dari 36 BUMN. Saat melakukan kegiatan Jalan Sehat Peserta juga melakukan kegiatan pemungutan sampah di sepanjang rute Jalan Sehat, serta di lokasi Finish Jalan Sehat.

Tema Kegiatan BUHN 2019 adalah "SDM Unggul Indonesia Maju"

Waktu dan Kegiatan yang Dilaksanakan

Waktu pelaksanaan kegiatan adalah Bulan Mei – Desember 2019, dengan lokasi di Provinsi Bali dan Kalimantan Barat (saat SMN), dengan garis besar rangkaian acara:

1. Safari Ramadhan 1440 H*
2. Mudik Gratis
3. Siswa Mengenal Nusantara
4. Peringatan HUT RI ke – 74*

5. Peringatan Natal*
6. HUT Bersama KBUMN & BUMN*

Pada pelaksanaan kegiatan tertentu dengan tanda (*), juga dilaksanakan program tambahan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD):

1. Penyediaan Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK)
2. Pameran Produk Mitra Binaan BUMN
3. Pengecekan kesehatan dan Pengobatan Gratis
4. Beasiswa
5. Pasar Murah
6. Gerak Jalan Sehat



Desima E. Siahaan, Direktur SDM dan Umum PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai Pembina upacara Peringatan HUT RI ke-74.

Siswa Mengenal Nusantara

Sebagai bagian dari rangkaian program BUMN Hadir Untuk Negeri, PGN merealisasikan program Siswa Mengenal Nusantara (SMN). Acara ini ditujukan untuk memperkuat landasan kebangsaan dan memperluas wawasan generasi muda penerus pembangunan bangsa.

Siswa Mengenal Nusantara (SMN) merupakan program pengenalan budaya dan potensi antar daerah yang diikuti oleh Siswa-siswa SMA terpilih yang diseleksi dari beberapa Provinsi dengan tujuan antara lain: (1) Menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air kepada para peserta SMA/SMK/SLB; (2) Mengenalkan ragam kekayaan Nusantara dan potensi daerah melalui interaksi langsung Siswa dengan komponen Pemerintahan dan Masyarakat di provinsi yang dikunjungi.

Secara keseluruhan ada 37 BUMN besar yang aktif terlibat dalam acara ini, dan dibagi kedalam kelompok pelaksana sesuai Provinsi yang telah ditetapkan. PGN

mengelola program SMN untuk wilayah Provinsi Bali. Program kunjungan antar wilayah dilakukan ke Wilayah Kalimantan Barat, dan sebaliknya.

Ada beragam acara yang dijalankan sepanjang jadwal waktu pelaksanaan yang berlangsung mulai Juli – Agustus 2019. Namun demikian seluruh rangkaian tersebut mengikuti enam penyampaian program pengayaan wawasan, yakni:

1. Wawasan Sosial Budaya

Berisi materi pengenalan tentang aspek budaya, pariwisata dan juga tatanan sosial kemasyarakatan di daerah setempat. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan keberagaman budaya nusantara dan juga menanamkan nilai-nilai sosial kemanusiaan dalam tatanan masyarakat Indonesia.

2. Wawasan Pendidikan

Berisi materi pengenalan tentang sistem pendidikan berkualitas yang diselenggarakan oleh sekolah setempat baik sekolah umum (SMU),



Siswa/i Siswa Mengenal Nusantara bersama Vlogger asal Bali ,Putu Aditya Nugraha atau @commaditya.



PT Perusahaan Gas Negara Tbk memberikan pembekalan kepada Siswa/i Siswa Mengenal Nusantara 2019 Provinsi Bali.



Suasana kebersamaan para Siswa/i Siswa Mengenal Nusantara 2019 Provinsi Bali.



Potret bersama Siswa/i Siswa Mengenal Nusantara 2019 Provinsi Bali pada saat di Tugu Khatulistiwa.

sekolah khusus (SMK), universitas maupun sarana pendidikan lain yang diselenggarakan atas inisiatif dan swadaya masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran pada peserta pentingnya sistem pendidikan untuk menghasilkan manusia berkualitas, sebagai awal dari pembangunan bangsa yang kuat dan bermartabat.

3. Wawasan *Entrepreneurship*

Berisi materi pengenalan tentang UKM/Koperasi di daerah pilihan, mulai dari operasional sampai pada produk-nya. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat berkreasi dan berinovasi serta kejelian dalam menangkap peluang, hingga akhirnya mampu bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

4. Wawasan Pengenalan BUMN

Berisi materi pengenalan tentang BUMN setempat, mulai dari operasional sampai pada produk-nya, dengan tujuan siswa/i dapat mengenal BUMN. Apabila diperlukan, dapat dilaksanakan Kegiatan Siswa/i magang di 1 (satu) BUMN selama 1 (satu) hari.

5. Wawasan Nusantara (pelatihan *performance* budaya)

Berisi materi mengenai bela negara (radikalisme, narkoba, patriotisme & cinta tanah air, kesadaran berbangsa, keberagaman, penetrasi budaya asing dan teknologi, Pancasila dan ideologi) yang dilakukan selama 1/2 hari berkoordinasi bersama Kementerian Pertahanan di masing-masing

wilayah dan *team building* selama 1 (satu) hari yang berkoordinasi dengan TNI setempat. Diharapkan seluruh siswa dapat mempelajari ke 5 (lima) wawasan serta memahami sehingga mereka akan menjadi generasi yang cerdas, kuat, mandiri dan unggul.

Seleksi

Proses seleksi dilakukan untuk memilih perwakilan murid-murid SMA, guru pembimbing, siswa penyandang disabilitas, dan sebagainya. Proses seleksi dilakukan bertahap oleh BUMN Koordinator-PGN.

Dari proses seleksi dan Penetapan Peserta yang dilakukan pada tanggal 25-30 Juli 2019, terpilih komposisi peserta:

1. 25 siswa SMA/SMK kelas XI yang mewakili tiap Kota/Kabupaten di Bali
2. 25 siswa SMA/SMK kelas XI yang mewakili tiap Kota/Kabupaten di Kalimantan Barat
3. 6 orang guru teladan tingkat provinsi, (2 dari Bali dan 4 dari Kalimantan Barat)
4. 1 orang perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi
5. Perwakilan BUMN PIC dan Co-PIC

Mengingat acara SMN berlangsung di berbagai area, dan juga diikuti acara kunjungan ke Kepulauan Riau, seluruh peserta acara SMN tersebut mendapatkan Asuransi Kecelakaan diri dari Jasindo.



Perpustakaan Daerah memberikan materi kepada Siswa/i Siswa Mengenal Nusantara 2019 Provinsi Kalimantan Barat.



Siswa/i Siswa Mengenal Nusantara 2019 Provinsi Kalimantan Barat di Pantai Pandawa.

Desa Binaan : Desa Panaran, Pulau Lance, Batam

Di Desa Panaran, Batam, PGN merealisasikan berbagai program pengembangan sesuai kompetensi warga setempat dalam kerangka Desa Binaan.

1. Taman Obat keluarga (Toga)

Tanaman obat keluarga merupakan media promosi kesehatan lingkungan dengan memupuk kesadaran masyarakat menanam tanaman

yang bernilai guna. Masyarakat di desa binaan dapat memaksimalkan pemanfaatan lingkungan pekarangan dan halaman rumah untuk menambah nilai keasrian serta kesejukan. Melalui program ini, masyarakat dapat aktif menanam dan membudidayakan tanaman obat untuk dimanfaatkan minimal dalam lingkup keluarga.

Testimoni masyarakat

"Program tanaman obat keluarga ini sangat baik dan bermanfaat terutama bagi keluarga dan masyarakat sekitar yang turut serta memanfaatkan tanaman obat keluarga ini. Adapun diharapkan tanaman obat yang ada dapat lebih terjaga kelestariannya dan masih dapat dinikmati oleh generasi berikutnya."

2. Ekonomi Kreatif

Melalui program ekonomi kreatif diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan masyarakat dan memaksimalkan hasil dari kelembagaan koperasi dan UMKM yang ada di desa binaan. Masyarakat juga dapat memperoleh modal untuk memulai usaha sehingga meningkatkan penghasilan mereka.

Program Ekonomi Kreatif ini juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja agar lebih berkembang dan mengurangi tingkat pengangguran di desa binaan tersebut. Selain itu, ekonomi kreatif yang telah dikembangkan diharapkan memunculkan ide-ide baru ataupun inovasi yang dapat dimanfaatkan bersama.

Testimoni masyarakat

"Program ekonomi kreatif ini sangat dirasakan manfaatnya oleh kami karena anggota kelompok ekonomi kreatif sudah mampu membuat inovasi produk seperti pembuatan keripik gonggong, keripik daun ubi, sambal kering daun ubi serta mie buah naga."

3. Pulau Warna-Warni dan Perahu Jong

Program Pulau Warna-Warni dan Perahu Jong merupakan program pengembangan potensi wisata di desa binaan setempat. Melalui pengembangan pariwisata ini diharapkan seluruh komponen desa dapat memperlihatkan keindahan pulau dengan rumah yang dicat warna-warni serta dapat melestarikan budaya lokal agar tetap bertahan dan dilestarikan.

Realisasi program ini disambut antusias masyarakat setempat, dengan ikut berperan aktif melakukan pengecatan rumah untuk mendukung program pulau warna warni ini. Mereka juga selalu berupaya melestarikan budaya lokal dengan mempertahankan apa yang telah diwariskan oleh generasi pendahulu. Masyarakat sadar bahwa pelestarian budaya lokal harus terus dilakukan agar tidak tergerus arus modernisasi yang sangat cepat perubahannya saat ini.

Testimoni masyarakat

"Masyarakat sangat terbantu dengan adanya program pulau warna-warni dan perahu jong ini terutama karena tujuan program ini sangat baik dan membantu masyarakat untuk pelestarian budaya lokal serta memperindah pulau untuk tujuan wisata."

Pemanfaatan Limbah Sapi menjadi Energi Baru dan Terbarukan, Desa Cibogo, Lembang

Desa Cibogo merupakan sentra produksi susu sapi perah dengan populasi sapi perah mencapai 1.800 ekor. Dari kegiatan pemeliharaan sapi tersebut, dihasilkan limbah sapi mencapai 8 kg/ekor/hari, atau mencapai 14 ton/hari. Selama ini, limbah ternak sapi yang ada kemudian dibuang ke sungai Citarum, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan.

Untuk mengelola kotoran sapi tersebut, PGN kemudian memberikan bantuan khusus kepada masyarakat desa Cibogo, yaitu pembangunan fasilitas pabrik pelletisasi kotoran sapi dengan kapasitas 400 kg/jam.

Program tersebut juga dilaksanakan dalam kerangka program kerja untuk memenuhi *Societal Needs Orientation* (SNO) di Kecamatan Lembang. Jika pabrik ini sudah terbukti kelayakannya, manfaatnya merata

dan berkelanjutan untuk masyarakat Cibogo, maka dapat dikembangkan untuk wilayah di luar Cibogo.

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan program dan fasilitas yang pelletisasi kotoran sapi, pihak desa secara mandiri membuat bendungan untuk menahan kotoran sapi yang sebelumnya dibuang disaluran air. Tujuannya adalah untuk mengalirkannya melalui pipa dan mengalihkan slurry (campuran kotoran sapi yang diencerkan dengan air) ke bak penampung kotoran dalam pabrik untuk diolah menjadi bio pellet.

Program pembangunan pabrik ini dilaksanakan sesuai dengan salah satu kebijakan Bidang CSR (CID) yaitu 'Mendukung Program Pemerintah'. Melalui bantuan ini PGN mendukung salah satu program pemerintah yakni 'Citarum Bersih' melalui program Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.



Running test mesin pellet pada pabrik pelletisasi.



Kunjungan Direktur Utama PGN ke lokasi pabrik bio pellet kohe sapi.



Produk yang dihasilkan dari pabrik pelletisasi kotoran sapi.



PEMERINTAH DESA CIBOGO
KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
Jl. Tangkuban Perahu No. 106 Cibogo-Lembang 40391 Telp. 022-82782391



AGUST SUTISNA, Kepala Desa Cibogo

PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA, Tbk sebagai bagian dari **Kementrian BUMN** yang memiliki wilayah oprasionalnya di Provinsi Jawa Barat, telah terasa memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Cibogo khususnya dan masyarakat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat pada umumnya.

Kontribusi PGN bagi masyarakat Desa Cibogo dibuktikan dengan membangun Pabrik Kotoran Hewan (KOHE) yang diolah menjadi pellet dimana kegunaannya untuk pupuk, bahan bakar dan pakan, selain lingkungan menjadi bersih juga menambah nilai ekonomis bagi warga.

Sebelum di bangunnya PABRIK KOHE pencemaran lingkungan diantaranya :

1. Para peternak selama ini membuang kotoran sapi ke sungai yang mencemari Sungai Citarum.
2. Sebagian kotoran sapi dibuang di halaman rumah yang menjadikan lingkungan tidak sehat.
3. Kotoran sapi juga dibuang secara langsung di lahan-lahan kosong yang menyebabkan tanah menjadi gembur yang mengakibatkan longsor.

Setelah dibangunnya PABRIK KOHE manfaat yang dirasakan adalah :

1. Perogram Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menjadikan aliran Sungai Citarum Harum dapat dikendalikan.
2. Lingkungan pemukiman penduduk menjadi bersih dan sehat.
3. Tanah di lereng lereng bukit tidak gembur lagi dan menjadi padat yang dapat terhindar dari bahaya longsor
4. Adanya nilai ekonomis bagi warga karena hasil Kotoran Hewan yang dibuang ke pabrik bisa dijadikan pupuk, bahan bakar dan pakan yang dikelola oleh BUMDES Desa Cibogo.

Atas nama Pemerintah Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada PGN dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan di Desa Cibogo.

Hormat kami,

KEPALA DESA CIBOGO



AGUST SUTISNA



06

TEMUAN AUDITOR DAN KEPUTUSAN RUPS

Dalam rangka menunjukkan komitmen transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan PKBL, kami merealisasikan pelaksanaan audit umum atas pengelolaan keuangan PKBL secara berkala. Audit umum dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik untuk menjamin akurasi dan independensi pandangan audit.

SAHAM





Kami menyusun program PKBL dengan memperhatikan keselarasannya dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan skala global sesuai rumusan tujuan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

NAMA AUDITOR/KAP, TEMUAN AUDITOR, JENIS PEMERIKSAAN DAN OPINI SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Uraian	2018	2019
Nama Auditor	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia)
Temuan Auditor	-	-
Jenis Pemeriksaan	Audit ETAP	Audit ETAP
Opini	Wajar dalam semua hal yang Material	Wajar dalam semua hal yang Material

TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDITOR DAN TEMUAN AUDITOR YANG BELUM DILAKSANAKAN SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Tidak ada temuan di tahun 2018 maupun di tahun 2019, sehingga tidak ada tindak lanjut yang dilakukan.

TINDAK LANJUT ARAHAN RUPS, KEMENTERIAN BUMN, DAN DEWAN KOMISARIS/ PENGAWAS ATAS PKBL

RUPST tanggal 26 April 2019 menyetujui untuk menetapkan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia) untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.

PENUTUP

Dalam tahun 2019, kami tetap melakukan pembinaan kepada mitra binaan melalui dukungan promosi produk mitra binaan dengan partisipasi mitra binaan pada pameran lokal maupun internasional.

KESIMPULAN

- Selama tahun 2019, PGN terus melakukan sinergi dengan BUMN lain dalam Program Bina Lingkungan, dengan mengelola dana biaya perusahaan. PGN telah melakukan penyaluran program Pengentasan Kemiskinan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum melalui kerjasama dengan PT Kirana Permata dengan mengembangkan Koperasi Karet dalam penjualan Karet dan dengan Kimia Farma maupun Balai Pustaka dalam Program BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Bali dan Kalimantan Barat.
- Pada tahun 2019, PGN merealisasikan pengalihan pengelolaan dana/portofolio Program Kemitraan kepada PT PMN yang telah resmi ditunjuk sebagai BUMN Khusus. Total portofolio dana Program Kemitraan yang dialihkan adalah sebesar Rp177,97 miliar. Dengan realisasi pengalihan tersebut saldo pengelolaan portofolio pinjaman Mitra Binaan yang dikelola PGN tinggal Rp9,32 miliar.
- Perseroan tetap melanjutkan *social mapping* desa binaan di sekitar wilayah operasi agar realisasi kegiatan PKBL dimasa mendatang berjalan semakin efektif.

4. Program Bina Lingkungan PGN sampai dengan akhir tahun 2019, dilaksanakan dengan memanfaatkan biaya perusahaan. Program-program yang telah direalisasikan adalah BUMN Hadir untuk Negeri, Berbagi Bingkisan Ramadhan, Mudik Bareng, dan berbagai program lainnya seperti bantuan kesehatan dalam bentuk bantuan alat kesehatan bagi masyarakat sekitar wilayah operasi, pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam bentuk penyediaan mobil sehat PGN selain sumbangan mobil *ambulance* ke beberapa daerah yang membutuhkan, bidang pendidikan dan pelatihan (misalnya pembenahan Laboratorium Bahasa Institut Teknologi DEL), sarana dan prasarana umum (diantaranya: bantuan pembangunan fasilitas pabrik pelletisasi kotoran sapi di Desa Binaan Cibogo yang juga akan dikembangkan di luar daerah Cibogo), selain mengelola BalkonDes Karangrejo. PGN juga konsisten mendukung pengembangan Desa Binaan lainnya dalam rangka mengentaskan kemiskinan, diantaranya di Dusun IV Pagardewa, Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan kegiatan

meliputi: pembentukan BUMDes Pagardewa, Koperasi Paderta Arto Mulyo, Koperasi Simpan Pinjam dan Bank Sampah.

5. Kami menyusun program PKBL dengan memperhatikan keselarasannya dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan skala global sesuai rumusan tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), mendukung upaya Pemerintah mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dalam SDGs tersebut, sekaligus mengembangkan usaha PGN dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
6. Dalam rangka menghasilkan kinerja terbaik, pengelolaan PKBL akan kami perbaiki kualitas pelaksanaan maupun pengelolaannya, dengan menjalankan beragam program perbaikan yang meliputi penyempurnaan sistem dan prosedur, peningkatan implementasi, optimalisasi penyaluran serta pengelolaan piutang.



HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN PEMEGANG SAHAM

Perlu kebijakan mengenai penghapusan piutang bermasalah yang kemungkinan pengembalian sangat kecil.

HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN KEPUTUSAN DALAM RUPS

1. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2019.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite at de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan

PKBL. Pembebasan tanggung jawab ini mencakup banyak hal sejauh tindakan tersebut tertulis dalam laporan PKBL yang telah diaudit oleh Auditor tahun sebelumnya.

3. Penetapan Auditor atas Laporan Keuangan PKBL untuk tahun buku 2020.
4. Menindaklanjuti Permen BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, kami mengusulkan agar pengelolaan sisa portofolio Program Kemitraan diserahkan kepada BUMN Khusus yang memiliki kompetensi dibidangnya, sehingga pelaksanaan Program Kemitraan berjalan dengan lebih efektif demi tercapainya tujuan program dimaksud.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Variabel Utama Pelaksanaan PKBL & TJSL

Tahun 2019

(Dalam Satuan Rupiah)

LAMPIRAN 1

No.	Uraian	Saldo Alokasi Laba		Biaya Perusahaan		TOTAL PKBL+TJSL
		Program Kemitraan	Program Bina Lingkungan	Program Bina Lingkungan	Program TJSL	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 2+3+4+5)
Dana Tersedia :						
1	Saldo Awal *)	181.854.219.608	207.788.361	0	0	182.062.007.969
2	Penyisihan laba dari BUMN Pembina/ APGN	0	0	0	0	0
3	Biaya Dari BUMN Pembina/APGN	0	0	56.853.380.636	39.800.000.000	96.653.380.636
4	Pengembalian Pinjaman Mintra Binaan	3.126.408.671	0	0	0	3.126.408.671
5	Pengembalian Dana dari BUMN Pembina Lain/ Lembaga Penyalur	0	0	0	0	0
6	Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	212.249.000	0	0	0	212.249.000
7	Pendapatan lain ***)	1.151.100.459	1.198.320	0	0	1.152.298.779
8	Penerimaan Lain	952.908.606	0	0	0	952.908.606
9	Dana Tersedia (jumlah 1 s.d. 7)	187.296.886.344	208.986.681	0	0	284.159.253.661
10 Penyaluran Dana dan Biaya Operasional						
11	Penyaluran melalui BUMN khusus	177.974.635.344	0	0	0	177.974.635.344
12	Penyaluran Melalui BUMN Pembina Lain/ Lembaga Penyalur	0	0	0	0	0
13	Penyaluran Hibah/Dana Pembinaan	0	0	0	0	0
14	Penyaluran Dana Bina Lingkungan	0	100.300.060	52.130.263.238		52.270.263.238
15	Penyaluran Dana TJSL	0	0	0	37.100.372.267	37.100.372.267
16	Biaya Operasional (Biaya Bank)	0	0	0	0	0
17	Beban Yang Masih Harus Dibayarkan	0	65.600.000	0	0	65.600.000
18	Jumlah Penyaluran Dana dan Biaya Operasional (jumlah 9 s.d. 16)	177.974.635.344	205.600.000	0	0	267.410.870.849
19	Dana Tersedia per 31 Desember 2019 (8-17)	9.322.251.000	3.386.681	4.723.117.398	2.699.627.733	16.748.382.812

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Variabel Utama Pelaksanaan PKBL & TJSL

Realisasi Akumulasi Penyaluran Program Bina Lingkungan (Alokasi Laba)

sampai dengan Tahun 2018 dan Tahun 2019

Berdasarkan Jenis Bantuan yang Disalurkan

(Dalam Satuan Rupiah)

LAMPIRAN 2

Jenis Bantuan	s.d. Th 2018	Penyaluran Th 2019	Realisasi s.d. 2019
(1)	(2)	(3)	(4 = 2 + 3)
Bantuan Korban Bencana Alam	12.767.043.043	0	12.767.043.043
Bantuan Pendidikan Dan/Atau Pelatihan	138.975.341.741	90.000.000	139.065.341.741
Bantuan Peningkatan Kesehatan	44.497.141.486	10.000.000	44.507.141.486
Bantuan Pengembangan Prasarana Dan/Atau Sarana Umum	51.581.024.759	300.060	51.581.324.819
Bantuan Sarana Ibadah	55.242.632.353	0	55.242.632.353
Bantuan Pelestarian Alam	21.787.475.280	0	21.787.475.280
Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan	2.300.610.897	0	2.300.610.897
Bantuan Pembinaan MB	420.391.650	0	420.391.650
Sub Jumlah	327.571.661.209	100.300.060	327.671.961.269
BUMN Peduli	69.123.473.905	0	69.123.473.905
Jumlah	396.695.135.114	100.300.060	396.795.435.174

Catatan: Penyaluran dana yang dilaporkan hanya mencakup dana BUMN Pembina sendiri yang disalurkan melalui BUMN Pembina lain/pihak ketiga

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Realisasi Akumulasi Penyaluran Program Bina Lingkungan (Alokasi Laba)
sampai dengan Tahun 2018 dan Tahun 2019

Berdasarkan Provinsi

(Dalam Satuan Rupiah)

LAMPIRAN 3

Provinsi	s.d. Th 2018	Penyaluran Th 2019	Realisasi s.d. 2019
(1)	(2)	(3)	(4 = 2 + 3)
Aceh Nanggroe Darussalam	504.800.000	0	504.800.000
Bali	1.034.771.200	0	1.034.771.200
Banten	17.136.516.356	0	17.136.516.356
Bengkulu	270.000.000	0	270.000.000
D. I. Yogyakarta	3.489.023.007	0	3.489.023.007
DKI Jakarta	77.703.098.382	65.300.060	77.768.398.442
Jambi	29.400.000	0	29.400.000
Jawa Barat	52.058.498.319	25.000.000	52.083.498.319
Jawa Tengah	7.570.865.878	(40.000.000)	7.530.865.878
Jawa Timur	43.158.417.614	50.000.000	43.208.417.614
Kalimantan Barat	200.000.000	0	200.000.000
Kalimantan Selatan	150.000.000	0	150.000.000
Kalimantan Utara	150.000.000	0	150.000.000
Kepri	8.106.953.971	0	8.106.953.971
Lampung	45.905.268.143	0	45.905.268.143
Nusa Tenggara Barat	2.838.198.840	0	2.838.198.840
Nusa Tenggara Timur	390.000.000	0	390.000.000
Papua	1.186.514.621	0	1.186.514.621
Riau	1.293.006.651	0	1.293.006.651
Sulawesi Selatan	543.228.800	0	543.228.800
Sulawesi Utara	25.400.000	0	25.400.000
Sulawesi Tenggara	29.400.000	0	29.400.000
Gorontalo	240.000.000	0	240.000.000
Sumatera Barat	1.618.014.436	0	1.618.014.436
Sumatera Selatan	43.554.535.784	0	43.554.535.784
Sumatera Utara	18.235.749.207	0	18.235.749.207
Maluku	150.000.000	0	150.000.000
Jumlah	327.571.661.209	100.300.060	327.671.961.269

Catatan: Realisasi Penyaluran tidak termasuk BL BUMN Peduli Penyaluran dana yang dilaporkan hanya mencakup dana BUMN Pembina sendiri yang disalurkan melalui BUMN Pembina lain/Pihak ketiga.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Realisasi Akumulasi Penyaluran Program Kemitraan
sampai dengan Tahun 2018 dan Tahun 2019
Berdasarkan Provinsi

LAMPIRAN 4

Sektor Usaha Mitra Binaan	s.d. Th 2018		Penyaluran Th 2019		Realisasi s.d. 2019	
	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 + 2)	(7 = 5 + 3)
Industri	1.662	46.896.850.000	0	0	1.662	46.896.850.000
Perdagangan	1.784	24.916.425.000	0	0	1.784	24.916.425.000
Pertanian	70.451	268.240.500.000	0	0	70.451	268.240.500.000
Peternakan	622	13.872.282.000	0	0	622	13.872.282.000
Perkebunan	14.834	380.525.000.000	0	0	14.834	380.525.000.000
Perikanan	76	1.045.000.000	0	0	76	1.045.000.000
Jasa	1.188	25.477.325.000	0	0	1.188	25.477.325.000
Lainnya	95	2.822.000.000	0	0	95	2.822.000.000
Dana Pembinaan Kemitraan	0	60.066.236.935	0	0	0	60.066.236.935
Jumlah	90.712	823.861.618.935	0	0	90.712	823.861.618.935

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Realisasi Akumulasi Penyaluran Program Kemitraan
sampai dengan Tahun 2018 dan Tahun 2019
Berdasarkan Provinsi

LAMPIRAN 5

Provinsi	s.d. Th 2018		Penyaluran Th 2019		Realisasi s.d. 2019	
	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 + 2)	(7 = 5 + 3)
Aceh Nanggroe Darusalam	6.080	6.830.305.938	0	0	6.080	6.830.305.938
Bali	22	422.000.000	0	0	22	422.000.000
Banten	8.163	21.115.562.579	0	0	8.163	21.115.562.579
D.I. Yogyakarta	1.814	29.089.683.736	0	0	1.814	29.089.683.736
DKI Jakarta	620	14.008.700.000	0	0	620	14.008.700.000
Jambi	213	2.336.000.000	0	0	213	2.336.000.000
Jawa Barat	24.391	85.688.365.497	0	0	24.391	85.688.365.497
Jawa Tengah	21.389	103.745.519.213	0	0	21.389	103.745.519.213
Jawa Timur	17.790	404.038.835.487	0	0	17.790	404.038.835.487
Kalimantan Barat	711	9.030.792.500	0	0	711	9.030.792.500
Kalimantan Timur	131	1.339.344.000	0	0	131	1.339.344.000
Lampung	2.231	33.199.613.310	0	0	2.231	33.199.613.310
Nusa Tenggara Timur	1	30.000.000	0	0	1	30.000.000
Papua	3	193.500.000	0	0	3	193.500.000
Riau	175	1.524.800.000	0	0	175	1.524.800.000
Sulawesi Selatan	1.952	14.121.009.576	0	0	1.952	14.121.009.576
Sumatera Barat	83	877.500.000	0	0	83	877.500.000
Sumatera Selatan	2.423	24.038.500.000	0	0	2.423	24.038.500.000
Sumatera Utara	2.520	12.165.350.164	0	0	2.520	12.165.350.164
Dana Pembinaan Kemitraan	0	60.066.236.935	0	0	0	60.066.236.935
Jumlah	90.712	823.861.618.935	0	0	90.712	823.861.618.935

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan (Alokasi Laba)

Tahun 2018 dan Tahun 2019

Berdasarkan Jenis Bantuan yang Disalurkan

(Dalam Satuan Rupiah)

LAMPIRAN 6

Jenis Bantuan	Tahun 2018		Tahun 2019		
	Realisasi	Rencana	Realisasi	% terhadap Rencana	% dari tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)	(6) = (4)/(2)
Bantuan Korban Bencana Alam	0	0	0	-	-
Bantuan Pendidikan Dan/Atau Pelatihan	0	0	90.000.000	-	-
Bantuan Peningkatan Kesehatan	0	0	10.000.000	-	-
Bantuan Pengembangan Prasarana Dan/Atau Sarana Umum	0	0	300.060	-	-
Bantuan Sarana Ibadah	0	0	0	-	-
Bantuan Pelestarian Alam	0	0	0	-	-
Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan	0	0	0	-	-
Bantuan Pembinaan MB	0	0	0	-	-
Sub Jumlah	0	0	100.300.060	-	-
BUMN Peduli	0	0	0	-	-
Jumlah	0	0	100.300.060	-	-

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Realisasi Akumulasi Penyaluran Program Kemitraan (Alokasi Laba)
sampai dengan Tahun 2018 dan Tahun 2019

Berdasarkan Provinsi

(Dalam Satuan Rupiah)

LAMPIRAN 7

No.	Provinsi	Realisasi Penyaluran Tahun 2018	Rencana Penyaluran Tahun 2019	Realisasi Penyaluran Tahun 2019	% dari tahun lalu	% terhadap Rencana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(3)	(7) = (5)/(4)
1	Aceh Nanggroe Darussalam	0	0	0	-	-
2	Bali	0	0	0	-	-
3	Banten	0	0	0	-	-
4	Bengkulu	0	0	0	-	-
5	D. I. Yogyakarta	0	0	0	-	-
6	DKI Jakarta	0	0	65.300.060	-	-
7	Jambi	0	0	0	-	-
8	Jawa Barat	0	0	25.000.000	-	-
9	Jawa Tengah	0	0	(40.000.000)	-	-
10	Jawa Timur	0	0	50.000.000	-	-
11	Kalimantan Barat	0	0	0	-	-
12	Kalimantan Selatan	0	0	0	-	-
13	Kalimantan Utara	0	0	0	-	-
14	Kepri	0	0	0	-	-
15	Lampung	0	0	0	-	-
16	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	-	-
17	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	-	-
18	Papua	0	0	0	-	-
19	Riau	0	0	0	-	-
20	Sulawesi Selatan	0	0	0	-	-
21	Sulawesi Utara	0	0	0	-	-
22	Sulawesi Tenggara	0	0	0	-	-
23	Gorontalo	0	0	0	-	-
24	Sumatera Barat	0	0	0	-	-
25	Sumatera Selatan	0	0	0	-	-
26	Sumatera Utara	0	0	0	-	-
27	Maluku	0	0	0	-	-
Jumlah		0	0	100.300.060	-	-

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Posisi Piutang Program Kemitraan

Tahun 2018 dan Tahun 2019

Berdasarkan Provinsi

LAMPIRAN 8

No	Provinsi	Posisi Tahun 2018		Posisi Tahun 2019		% dari Tahun Lalu	
		Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp	% Jumlah Unit Mitra Binaan	% Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(3)	(8)=(6)/(4)
1	Aceh	0	0	0	0	-	-
2	Bali	0	0	0	0	-	-
3	Banten	3	33.660.288	3	33.578.288	100	100
4	D. I. Yogyakarta	59	824.458.022	57	803.048.022	97	97
5	DKI Jakarta	10	234.072.560	9	219.664.227	90	94
6	Jambi	0	0	0	0	-	-
7	Jawa Barat	56	858.933.273	55	858.633.273	100	100
8	Jawa Tengah	232	7.849.769.411	232	7.793.788.816	100	99
9	Jawa Timur	271	3.852.402.901	272	2.044.950.230	100	53
10	Lampung	28	719.890.000	27	715.440.000	96	99
11	Riau	6	92.557.219	6	91.557.219	100	99
12	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	-	-
13	Sulawesi Barat	0	0	0	0	-	-
14	Sumatera Barat	0	0	0	0	-	-
15	Sumatera Selatan	47	2.174.770.334	47	2.174.770.334	100	100
16	Sumatera Utara	2	105.770.000	2	104.950.000	100	99
17	Bangka Belitung	0	0	0	0	-	-
Jumlah		714	16.746.284.008	710	14.840.380.409	100	89

Tidak termasuk piutang bermasalah

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Posisi Piutang Program Kemitraan

Per 31 Desember 2019 Berdasarkan Sektor dan Kualitas Piutang

LAMPIRAN 9

Sektor Usaha Mitra Binaan	Lancar		Kurang Lancar		Diragukan		Macet		Total	
	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp
Sektor Usaha Industri	269	1.709.960.784	0	0	0	0	111	1.871.538.948	380	3.581.499.732
Sektor Usaha Perdagangan	0	0	0	0	0	0	18	275.643.426	17	275.643.426
Sektor Usaha Pertanian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sektor Usaha Perkebunan	0	0	0	0	0	0	79	3.242.558.300	79	3.242.558.300
Sektor Usaha Peternakan	0	0	0	0	0	0	223	7.256.256.650	223	7.256.256.650
Sektor Usaha Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sektor Usaha Jasa	2	10.289.000	0	0	0	0	7	438.372.634	9	448.661.634
Sektor Usaha Lainnya	0	0	0	0	0	0	2	35.760.667	2	35.760.667
Jumlah	271	1.720.249.784	0	0	0	0	440	13.120.130.625	710	14.840.380.409

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Posisi Piutang Bermasalah Program Kemitraan

Per Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019

Berdasarkan Provinsi

LAMPIRAN 10

No	Provinsi	Posisi Tahun 2018		Posisi Tahun 2019		% dari Tahun Lalu	
		Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp	% Jumlah Mitra Binaan	% Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(3)	(8)=(6)/(4)
1	Aceh	3.041	3.171.782.969	3.041	3.171.782.969	100	100
2	Bali	17	246.140.000	16	231.140.000	94	94
3	Banten	857	5.784.538.016	853	5.748.988.016	100	99
4	D. I. Yogyakarta	884	17.800.914.849	882	17.672.056.182	100	99
5	DKI Jakarta	527	8.510.463.377	526	8.509.738.377	100	100
6	Jambi	207	1.826.620.305	207	1.826.620.305	1	11
7	Jawa Barat	4.032	21.412.354.613	4.024	21.318.421.480	5	9
8	Jawa Tengah	10.162	36.027.070.835	10.143	34.750.515.753	40	59
9	Jawa Timur	2.531	18.965.079.414	2.523	18.855.868.414	401	183
10	Kalimantan Barat	447	6.588.058.750	447	6.588.058.750	564	286
11	Kalimantan Timur	131	1.234.371.000	131	1.234.371.000	341	534
12	Lampung	843	8.749.902.111	839	8.707.857.667	16	14
13	NTT	1	30.000.000	1	30.000.000	83900	29026
14	Papua	3	193.500.000	3	193.500.000	33	16
15	Riau	165	1.246.702.498	165	1.244.264.498	100	100
16	Sulawesi Selatan	1.939	13.212.036.445	1.937	13.206.121.445	0	0
17	Sulawesi Barat	9	65.950.000	9	65.950.000	-	-
18	Sumatera Barat	62	528.610.000	62	528.610.000	3124	2498
19	Sumatera Selatan	536	6.323.668.062	532	6.276.288.062	99	99
20	Sumatera Utara	1.924	10.341.420.230	1.923	10.329.145.230	100	100
21	Bangka Belitung	1	20.000.000	1	20.000.000	0	0
Jumlah		28.319	162.279.183.474	28.265	160.509.298.148	100	99

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Posisi Piutang Bermasalah Program Kemitraan

Per Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019

Berdasarkan Sektor

LAMPIRAN 11

Sektor Usaha Mitra Binaan	Posisi Tahun 2018		Posisi Tahun 2019		% dari Tahun Lalu	
	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp	% Jumlah Mitra Binaan	% Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(2)	(7)=(5)/(3)
Sektor Usaha Industri	823	12.349.969.917	807	12.173.922.167	98	99
Sektor Usaha Perdagangan	1.582	17.288.145.670	1.558	16.986.159.205	98	98
Sektor Usaha Pertanian	24.642	114.440.829.043	24.642	113.226.079.043	100	99
Sektor Usaha Peternakan	176	2.121.422.457	174	2.118.808.013	99	100
Sektor Usaha Perkebunan	7	204.395.416	7	204.395.416	0	0
Sektor Usaha Perikanan	75	934.171.334	75	933.361.334	100	100
Sektor Usaha Jasa	932	13.619.102.359	921	13.526.825.692	99	99
Sektor Usaha Lainnya	82	1.321.147.278	81	1.339.747.278	99	101
Jumlah	28.319	162.279.183.474	28.265	160.509.298.148	100	99



PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Realisasi Penyaluran Dana CSR

Tahun 2019

Berdasarkan Bentuk Bantuan dan Provinsi

(Dalam Satuan Rupiah)

LAMPIRAN 12

Provinsi	Bentuk Bantuan			
	Bencana Alam	Pendidikan dan Pelatihan	Kesehatan	Sarana dan Prasarana Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	-	160.000.000	-	382.152.400
Bali	-	1.016.791.085	50.000.000	44.027.294
Banten	381.280.156	606.926.853	90.000.000	659.223.592
Bengkulu	50.000.000	-	-	330.256.374
Gorontalo	-	250.000.000	-	3.311.000
Jakarta	1.135.795.236	2.454.470.750	23.298.566.231	3.090.957.588
Jambi	-	45.200.000	-	119.381.788
Jawa Barat	97.499.000	3.248.073.263	35.000.000	1.783.151.614
Jawa Tengah	-	2.707.062.043	74.960.000	1.853.255.905
Jawa Timur	-	1.372.580.275	604.623.570	787.408.433
Kalimantan Barat	-	102.504.250	-	9.934.100
Kalimantan Selatan	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	-	-	-	6.785.140
Kalimantan Timur	-	300.000.000	-	3.011.086
Kalimantan Utara	-	-	286.000.000	1.292.700
Kep. Bangka Belitung	-	75.000.000	-	80.760.050
Kep. Riau	-	-	145.918.285	162.768.475
Lampung	-	110.431.706	138.135.453	193.138.010
Maluku	100.500	1.111.111.111	-	17.016.240
Maluku Utara	50.000.000	-	-	17.247.000
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	2.920.000
Nusa Tenggara Timur	-	-	50.000.000	5.755.376
Papua	100.000.000	480.000.000	-	16.461.040
Papua Barat	-	-	-	-
Riau	-	270.415.855	170.200.000	57.137.300
Sulawesi Barat	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	-	5.000.000	148.700.000	920.000
Sulawesi Tengah	20.981.800	170.000.000	-	2.618.000
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	-	-	3.698.000
Sumatera Barat	-	340.700.865	-	105.347.500
Sumatera Selatan	-	166.531.706	556.940.402	248.924.455
Sumatera Utara	-	1.880.136.681	422.304.820	193.061.350
Yogyakarta	-	1.639.638.798	-	240.975.832
Jumlah	1.835.656.692	18.512.575.241	26.071.348.761	10.422.897.642

Sarana Ibadah	Bentuk Bantuan			Total Penyaluran per Provinsi
	Pelestarian Alam	Pengentasan Kemiskinan	Diklat Peningkatan Kapasitas UKM	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10=1+2+3+4+5+6+7+8+9)
85.000.000	-	163.416.900	-	790.569.300
2.125.485.022	-	199.999.992	-	3.436.303.393
426.615.873	-	464.985.600	-	2.629.032.074
-	-	-	-	380.256.374
-	-	-	-	253.311.000
7.497.784.788	171.469.463	2.158.799.065	-	39.807.843.121
10.000.000	-	-	-	174.581.788
2.171.968.500	89.722.710	686.825.231	-	8.112.240.318
1.259.934.000	-	889.526.067	-	6.784.738.015
1.845.815.150	-	1.626.343.534	-	6.236.770.962
570.000.000	-	-	-	682.438.350
-	-	-	-	-
120.500.000	48.500.000	-	-	175.785.140
300.000.000	-	-	-	603.011.086
27.000.000	-	-	-	314.292.700
150.000.000	-	-	-	305.760.050
192.347.000	252.105.238	587.375.200	-	1.340.514.198
380.175.000	20.000.000	401.800.000	-	1.243.680.169
425.000.000	-	50.000.000	-	1.603.227.851
200.000.000	-	-	-	267.247.000
-	-	300.000.000	-	302.920.000
250.000.000	-	-	-	305.755.376
150.000.000	-	-	-	746.461.040
-	-	-	-	-
351.145.751	96.624.000	1.215.000.000	-	2.160.522.906
-	-	-	-	-
5.000.000	5.000.000	170.000.000	-	334.620.000
-	-	210.000.000	-	403.599.800
-	-	-	-	-
250.000.000	-	-	-	253.698.000
10.000.000	-	4.800.000	-	460.848.365
825.455.000	490.630.000	940.534.800	-	3.229.016.363
1.125.845.000	-	36.595.000	-	3.657.942.851
102.983.345	-	350.350.000	-	2.333.947.975
20.858.054.429	1.174.051.411	10.456.351.389	-	89.330.935.565

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Realisasi Penyaluran Dana CSR

Tahun 2018

Berdasarkan Bentuk Bantuan dan Provinsi

(Dalam Satuan Rupiah)

LAMPIRAN 13

Provinsi	Bentuk Bantuan			
	Bencana Alam	Pendidikan dan Pelatihan	Kesehatan	Sarana dan Prasarana Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	-	100.000.000	-	382.541.655
Bali	25.000.000	202.602.780	-	33.766.175
Banten	-	396.651.731	152.000.000	653.078.402
Bengkulu	-	42.059.000	-	2.719.750
Gorontalo	-	250.000.000	-	5.311.048
Jakarta	616.944.984	2.976.934.815	21.615.584.625	3.391.791.258
Jambi	-	-	-	111.614.350
Jawa Barat	-	2.630.394.171	265.920.000	792.203.977
Jawa Tengah	-	2.559.691.097	1.232.424.192	1.795.973.933
Jawa Timur	-	2.074.158.484	1.497.309.530	1.160.363.879
Kalimantan Barat	-	50.000.000	-	4.439.500
Kalimantan Selatan	-	180.000.000	-	4.375.000
Kalimantan Tengah	-	120.000.000	-	5.025.000
Kalimantan Timur	-	200.000.000	-	5.587.980
Kalimantan Utara	-	60.000.000	-	25.080.560
Kep. Bangka Belitung	-	-	-	2.659.800
Kep. Riau	-	-	42.984.900	169.904.349
Lampung	75.000.000	284.298.462	1.550.088.180	293.114.083
Maluku	-	36.122.086	-	14.677.700
Maluku Utara	-	-	-	50.000.000
Nusa Tenggara Barat	636.647.059	3.000.000	-	17.943.616
Nusa Tenggara Timur	-	-	200.000.000	4.729.000
Papua	-	270.000.000	-	-
Papua Barat	-	-	-	-
Riau	-	1.380.917.548	44.305.952	274.681.313
Sulawesi Barat	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	-	767.612.159	-	31.450.903
Sulawesi Tengah	311.760.020	40.000.000	222.749.901	273.603.749
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	-	-	39.292.803
Sumatera Barat	-	970.000	-	32.324.105
Sumatera Selatan	-	356.931.462	1.230.663.630	441.853.832
Sumatera Utara	-	463.965.731	1.289.295.130	155.385.988
Yogyakarta	-	128.465.731	-	14.194.950
Jumlah	1.665.352.063	15.574.775.257	29.343.326.040	10.189.688.658

Bentuk Bantuan				Total Penyaluran per Provinsi
Sarana Ibadah	Pelestarian Alam	Pengentasan Kemiskinan	Diklat Peningkatan Kapasitas UKM	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10=1+2+3+4+5+6+7+8+9)
50.000.000	250.000.000	30.000.000	-	812.541.655
320.125.000	-	-	-	581.493.955
698.319.000	-	50.000.000	-	1.950.049.133
-	-	-	-	44.778.750
-	-	-	-	255.311.048
6.693.209.704	541.944.984	2.138.439.875	-	37.974.850.245
69.500.000	-	-	-	181.114.350
2.785.206.700	100.000.000	401.315.516	-	6.975.040.364
1.370.798.506	323.885.000	1.158.275.225	-	8.441.047.953
2.169.355.000	25.000.000	259.018.575	-	7.185.205.468
430.000.000	-	-	-	484.439.500
-	-	-	-	184.375.000
-	50.000.000	-	-	175.025.000
204.843.950	-	-	-	410.431.930
145.000.000	-	30.000.000	-	260.080.560
200.000.000	-	150.000.000	-	352.659.800
407.093.100	719.558.400	198.935.000	-	1.538.475.749
528.250.000	-	100.000.000	-	2.830.750.725
250.000.000	-	-	-	300.799.786
200.000.000	-	-	-	250.000.000
300.000.000	-	300.000.000	-	1.257.590.675
50.000.000	-	-	-	254.729.000
104.066.760	-	-	-	374.066.760
-	-	-	-	-
836.300.000	396.624.000	105.133.000	-	3.037.961.813
-	-	-	-	-
535.200.000	-	36.000.000	-	1.370.263.062
145.000.000	-	-	-	993.113.670
-	-	-	-	-
195.000.000	-	-	-	234.292.803
-	-	5.785.400	-	39.079.505
1.036.361.056	2.015.000	185.000.000	-	3.252.824.980
1.160.926.845	-	-	-	3.069.573.694
395.000.000	-	312.984.140	-	850.644.821
21.279.555.621	2.409.027.384	5.460.886.731	-	85.922.611.754

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

**LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk;
2. Laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk tidak mengandung informasi atau fakta yang material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Februari 2020
Atas nama dan mewakili Dewan Direksi,
PT Perusahaan Gas Negara Tbk



Desima Equalita Siahaan
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

KEPADA PENGURUS PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Dalam melaksanakan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian yang wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini atas audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk tanggal 31 Desember 2019, serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

JAKARTA
20 Februari 2020

Yusron, S.E., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.0243

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**
Halaman 1
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4	9,325,637,681	182,062,007,969
Piutang Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") penyalur - bagian lancar, neto	5	1,665,489,059	1,666,664,004
Piutang pinjaman mitra binaan, neto	6	48,054,961	24,125,823
Piutang lain-lain, neto	7	214,848	23,647,043
Beban dibayar di muka		<u>153,885,955</u>	<u>153,885,955</u>
Jumlah aset lancar		<u>11,193,282,504</u>	<u>183,930,330,794</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang BUMN penyalur - bagian tidak lancar, neto	5	-	5,787,991,176
Jumlah aset tidak lancar		-	<u>5,787,991,176</u>
JUMLAH ASET		<u>11,193,282,504</u>	<u>189,718,321,970</u>
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Liabilitas yang masih harus dibayar		101,600,000	206,899,940
Angsuran belum teridentifikasi		1,144,325,295	1,746,558,038
Kelebihan pembayaran angsuran		<u>4,125,486</u>	<u>4,125,486</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>1,250,050,781</u>	<u>1,957,583,464</u>
ASET NETO			
Aset neto tidak terikat		<u>9,943,231,723</u>	<u>187,760,738,506</u>
Jumlah aset neto		<u>9,943,231,723</u>	<u>187,760,738,506</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>11,193,282,504</u>	<u>189,718,321,970</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

 Ikhtisar
Kinerja PKBL

Pendahuluan

 PKBL dan
Pembangunan
Berkelanjutan

 Pelaksanaan
Program PKBL

 Kerjasama
Penyaluran
PKBL

 Temuan Auditor
dan Keputusan
RUPS

 Lampiran -
Lampiran

 Laporan
Auditor
Independen

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Halaman 2

**LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN	9		
Pendapatan jasa giro		1,440,820,420	3,559,169,833
Pendapatan jasa administrasi pinjaman		252,634,489	289,648,722
Pendapatan lain-lain		<u>2,856,399,350</u>	<u>3,071,365,172</u>
JUMLAH PENDAPATAN		<u>4,549,854,259</u>	<u>6,920,183,727</u>
BEBAN			
Penyaluran dana melalui BUMN khusus	11	(177,974,635,344)	-
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman	12	(3,983,985,997)	(1,620,770,414)
Beban administrasi dan umum		(288,521,641)	(620,606,818)
Penyaluran bina lingkungan	10	(100,300,060)	-
Beban dan pengeluaran lainnya		<u>(19,918,000)</u>	<u>-</u>
JUMLAH BEBAN		<u>(182,367,361,042)</u>	<u>(2,241,377,232)</u>
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET NETO TIDAK TERIKAT		<u>(177,817,506,783)</u>	<u>4,678,806,495</u>
ASET NETO AWAL TAHUN		<u>187,760,738,506</u>	<u>183,081,932,011</u>
ASET NETO AKHIR TAHUN		<u>9,943,231,723</u>	<u>187,760,738,506</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Halaman 3

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pengembalian pinjaman dari BUMN penyalur	1,805,552,671	3,166,664,004
Pengembalian pinjaman mitra binaan	34,337,000	191,676,043
Pengembalian pinjaman piutang bermasalah	1,283,559,000	1,366,705,295
Pendapatan jasa giro	1,440,820,420	3,559,169,833
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	231,749,000	289,648,722
Penyaluran dana melalui BUMN khusus	(177,974,635,344)	-
Pengembalian sisa dana BUMN peduli	-	39,172,280
Pendapatan lain-lain	956,286,606	784,660,734
Penyaluran dana bina lingkungan	(205,600,000)	(475,388,000)
Beban administrasi dan umum	(288,521,641)	(620,606,818)
Beban dan pengeluaran lainnya	(19,918,000)	-
Kas neto (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	<u>(172,736,370,288)</u>	<u>8,301,702,093</u>
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO KAS DAN BANK	<u>(172,736,370,288)</u>	<u>8,301,702,093</u>
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	<u>182,062,007,969</u>	<u>173,760,305,876</u>
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	<u>9,325,637,681</u>	<u>182,062,007,969</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Ikhtisar
Kinerja PKBL

Pendahuluan

PKBL dan
Pembangunan
Berkelanjutan

Pelaksanaan
Program PKBL

Kerjasama
Penyaluran
PKBL

Temuan Auditor
dan Keputusan
RUPS

Lampiran -
Lampiran

Laporan
Auditor
Independen

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Halaman 4/1

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. INFORMASI MENGENAI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN ("PKBL")**a. Pendirian dan informasi umum**

PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("PGN") merupakan entitas anak PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang transmisi dan niaga gas bumi di Indonesia dan berkomitmen untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility ("CSR") melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan ("PKBL") yang diamanatkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL"). PGN membentuk Divisi CSR yang fungsi utamanya mengelola PKBL, berdasarkan:

- (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Peraturan Menteri Negara ("Meneg") BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 sebagai pengganti Surat Keputusan ("SK") Meneg BUMN KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 sebagai pengganti SK Menteri Keuangan No. 316/KMK/.016/1994 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan melalui pemanfaatan dana dari pembagian laba BUMN, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri ("Permen") BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, Permen BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016, dan Permen BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017.
- (3) Surat Edaran ("SE") Meneg BUMN No. 21/MBU/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial di Lingkungan BUMN.
- (4) SE Meneg BUMN No. 07/MBU/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang pelaksanaan dan penetapan pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- (5) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
- (6) SK Direksi PGN No. 0040300.K/OT.00/PDO/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Struktur Organisasi Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

b. Kegiatan utama

Kegiatan operasional PKBL adalah sebagai berikut:

1. Program Kemitraan ("PK")

Menyalurkan dana program kemitraan dalam bentuk:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Halaman 4/2

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. INFORMASI MENGENAI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (“PKBL”) (lanjutan)

b. Kegiatan utama (lanjutan)

2. Bina Lingkungan (“BL”)

Menyalurkan dana Bina Lingkungan dalam bentuk bantuan untuk korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan serta bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.

c. Sumber dana

Sumber dana PKBL berasal dari:

- Penyisihan sebagian laba BUMN pembina sampai dengan akhir tahun 2012;
- Pembayaran piutang oleh BUMN penyalur dan mitra binaan;
- Jasa administrasi pinjaman/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro; dan
- Pengembalian sisa dana BUMN peduli dari BUMN lain.

d. Susunan pengurus

Pengurus PKBL adalah Divisi CSR PGN. Kantor Divisi CSR beralamat di Gedung Graha PGAS, Jl. Kyai H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta Barat.

Pengurus PKBL pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Direktur Pembina PKBL dan

Direktur Sumber Daya Manusia & Umum BUMN Pembina	: Desima Equalita Siahaan
Kepala Divisi	: Anak Agung Raka Haryana
Kepala Departemen Operasional	: Erick Taufan
Kepala Departemen Perencanaan dan Pengawasan	: Tubagus Nurcholis

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan PKBL PGN telah disusun dan diselesaikan oleh Pengurus PKBL PGN pada tanggal 20 Februari 2020.

Pada awal tahun 2012, Meneg BUMN menerbitkan SE Meneg BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi PKBL dan SE Meneg BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi 2012. Kedua surat edaran tersebut diterbitkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK****Halaman 4/3****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**a. Dasar penyajian laporan keuangan (lanjutan)**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan PKBL didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK ETAP") sesuai dengan SE Meneg BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disusun dengan menggunakan metode langsung sesuai dengan PER-02/MBU/7/2017 yang merupakan amandemen dari PER-09/MBU/07/2015.

b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya.

c. Piutang kepada BUMN penyalur

Piutang kepada BUMN penyalur merupakan pinjaman yang diberikan kepada BUMN lain sebagai bentuk sinergi antar BUMN. Piutang kepada BUMN penyalur diakui pada saat terjadi penyerahan dana kepada BUMN penyalur serta dicatat sebesar jumlah neto dana yang diserahkan kepada BUMN penyalur, setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

d. Piutang pinjaman mitra binaan dan piutang lain-lain

Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh PKBL kepada mitra binaan. Piutang pinjaman mitra binaan diakui pada saat pinjaman tersebut disalurkan kepada mitra binaan dan diukur sebesar jumlah neto dana yang diserahkan kepada mitra binaan, setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Piutang lain-lain merupakan piutang jasa administrasi atas pinjaman yang sudah jatuh tempo dan piutang pengembalian sisa dana BUMN peduli dari BUMN lain.

Piutang pinjaman mitra binaan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok aset lancar sebesar jumlah yang diharapkan dapat ditagih dari mitra binaan.

Penggolongan kualitas pinjaman mitra binaan ditetapkan sebagai berikut:

- i. Lancar adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Halaman 4/4

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Piutang pinjaman mitra binaan dan piutang lain-lain (lanjutan)

- ii. Kurang lancar apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- iii. Diragukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- iv. Macet apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Penggolongan kualitas pinjaman diatas memperhatikan ketentuan dalam Pedoman Akuntansi.

e. Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan dan piutang lain-lain dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih, yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan data historis yang ada (minimal 2 tahun).

Perhitungan penyisihan piutang BUMN penyalur dilakukan secara individual. Perhitungan ini telah memperhitungkan nilai terpulihkan dari arus kas yang akan diterima PKBL di masa depan selama periode pembayaran.

f. Piutang pinjaman bermasalah

Piutang pinjaman bermasalah merupakan piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya melalui penjadwalan ulang dan rekondisi, namun tidak terpulihkan. Piutang bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman dengan penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar 100% dari saldo piutang bermasalah. Di tahun 2017, Pengurus secara formal melalui Nota Dinas No. 101500.ND/HM.05.03/CSR/2017 dari Kepala Divisi CSR kepada Direktur Pembina PKBL dan Direktur Keuangan BUMN Pembina, mendefinisikan piutang pinjaman bermasalah sebagai piutang Program Kemitraan dengan kriteria sebagai berikut:

- tidak terdapat pengembalian piutang yang substansial meskipun telah dilakukan upaya pemulihan pinjaman dan konfirmasi piutang selama 3 tahun; dan/atau
- pinjaman telah berusia lebih dari 10 tahun.

Alokasi pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai pengurang piutang pinjaman bermasalah dan disajikan sebagai aset tidak lancar.

g. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK****Halaman 4/5****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**h. Kelebihan pembayaran angsuran**

Kelebihan pembayaran angsuran adalah penerimaan angsuran yang melebihi saldo piutang mitra binaan. Kelebihan pembayaran angsuran diakui sebagai liabilitas pada saat setoran tersebut diterima oleh PKBL. Kelebihan pembayaran angsuran diukur dan dicatat sebesar nilai nominal kelebihan pembayaran angsuran. Kelebihan pembayaran angsuran disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas jangka pendek.

i. Angsuran belum teridentifikasi

Angsuran belum teridentifikasi adalah penerimaan angsuran yang belum dapat diidentifikasi nama mitra binaannya sampai dengan tanggal laporan keuangan. Angsuran belum dapat diidentifikasi diakui sebesar nilai nominal penerimaan. Angsuran yang belum teridentifikasi disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas jangka pendek.

j. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan PKBL dapat berasal dari:

- i. Pendapatan jasa administrasi pinjaman;
- ii. Pendapatan jasa giro;
- iii. Pengembalian sisa dana BUMN peduli; dan
- iv. Pendapatan lain-lain.

Penerimaan diakui pada saat terpenuhinya kondisi berikut:

- i. Jumlah pendapatan diukur secara andal;
- ii. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir ke dalam unit PKBL; dan
- iii. Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

Pendapatan jasa administrasi diakui hanya untuk piutang dengan kualitas lancar dan kurang lancar, dan diukur berdasarkan nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak dengan ketentuan manfaat ekonomis atas jasa administrasi tersebut kemungkinan besar akan mengalir ke dalam PKBL.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**
Halaman 4/6
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang

Dalam penentuan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang mitra binaan dan piutang lain-lain, Pengurus mempertimbangkan umur piutang dan melakukan perhitungan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yaitu umur piutang. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dihitung berdasarkan persentase tertentu tingkat keterlambatan data historis yang ada.

Perhitungan penyisihan piutang BUMN penyalur dilakukan secara individual dengan memperhitungkan estimasi nilai yang dapat ditagih berdasarkan arus kas yang akan diterima PKBL di masa depan selama periode pembayaran. Pada tanggal 31 Desember 2019, piutang dari PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) ("PTPN IX") telah jatuh tempo seluruhnya. Selama tahun 2019, tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh PTPN IX. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan ini, belum ada kesepakatan antara Pengurus dan PTPN IX untuk melakukan *rescheduling* pembayaran piutang tersebut. Oleh karena itu, Pengurus memutuskan untuk melakukan pencadangan seluruhnya atas piutang PTPN IX.

4. KAS DAN SETARA KAS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Program Kemitraan		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	9,322,251,000	181,854,219,608
	<u>9,322,251,000</u>	<u>181,854,219,608</u>
Program Bina Lingkungan		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	3,386,681	183,175,754
BRI	<u>-</u>	<u>24,612,607</u>
	<u>3,386,681</u>	<u>207,788,361</u>
Jumlah kas dan setara kas	<u>9,325,637,681</u>	<u>182,062,007,969</u>

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK****Halaman 4/7****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

5. PIUTANG BUMN PENYALUR

Piutang BUMN penyalur adalah pinjaman yang diberikan kepada PKBL BUMN lain sebagai bentuk sinergi antar PKBL sebagaimana diinstruksikan oleh Meneg BUMN. Piutang kepada BUMN penyalur terdiri dari piutang dari:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
PTPN IX	7,245,215,650	7,245,215,650
PT Garam (Persero) ("PT Garam")	<u>1,666,668,784</u>	<u>3,472,221,455</u>
Jumlah sebelum penyisihan penurunan nilai piutang	8,911,884,434	10,717,437,105
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang dari BUMN penyalur	<u>(7,246,395,375)</u>	<u>(3,262,781,925)</u>
Jumlah piutang usaha, neto	<u>1,665,489,059</u>	<u>7,454,655,180</u>
Dikurangi bagian lancar: PT Garam	<u>1,665,489,059</u>	<u>1,666,664,004</u>
Jumlah piutang bagian lancar, neto	<u>1,665,489,059</u>	<u>1,666,664,004</u>
Jumlah piutang bagian tidak lancar, neto	<u>-</u>	<u>5,787,991,176</u>
Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN penyalur adalah sebagai berikut:		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo awal	3,262,781,925	2,991,732,859
Kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>3,983,613,450</u>	<u>271,049,066</u>
Saldo akhir	<u>7,246,395,375</u>	<u>3,262,781,925</u>

Kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman pada laporan aktivitas.

Pada tanggal 28 Desember 2015, Pengurus melakukan penjadwalan kembali atas piutang PTPN IX dan PT Garam berdasarkan permintaan dari BUMN penyalur. Berikut ini adalah uraian perjanjian penjadwalan kembali yang telah disepakati PKBL dengan PTPN IX dan PT Garam.

Perjanjian penjadwalan kembali piutang dengan PTPN IX

PKBL PGN melakukan kerja sama penyaluran Program Kemitraan dengan PTPN IX melalui kontrak kerja sama No. 007600.K/HM.05/KEU2014. Pada tanggal 28 Desember 2015, PKBL PGN dan PTPN IX melakukan penjadwalan kembali sebesar Rp25.000.000.000 dengan biaya administrasi senilai Rp3.914.984.479. Pelunasan dilakukan bertahap mulai periode 2015 sampai 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019, piutang dari PTPN IX telah jatuh tempo seluruhnya. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan ini, belum ada kesepakatan antara Pengurus dan PTPN IX untuk melakukan *rescheduling* pembayaran piutang tersebut. Oleh karena itu, Pengurus memutuskan untuk melakukan pencadangan seluruhnya atas piutang PTPN IX.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Halaman 4/8

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

5. PIUTANG BUMN PENYALUR (lanjutan)

Perjanjian penjadwalan kembali piutang dengan PT Garam

PKBL PGN melakukan kerja sama penyaluran Program Kemitraan dengan PT Garam melalui kontrak kerja sama No. 019900.PK/HK.02/UT/2012 dan No. 037101.PK/HK.02/KEU/2012. Pada tanggal 28 Desember 2015, PKBL PGN dan PT Garam melakukan penjadwalan kembali sebesar Rp8.333.320.020 dengan biaya administrasi senilai Rp900.000.000. Pelunasan dilakukan bertahap mulai periode 2016 sampai 2020. Di tahun 2019, PT Garam telah melakukan pembayaran kembali pokok piutang sesuai dengan perjanjian penjadwalan kembali piutang. Saldo piutang pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp1.666.668.784.

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Piutang pinjaman dari mitra binaan	5,927,695,975	6,028,846,903
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(5,879,641,014)</u>	<u>(6,004,721,080)</u>
Piutang pinjaman dari mitra binaan, neto	<u>48,054,961</u>	<u>24,125,823</u>

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo awal	6,004,721,080	5,942,743,747
(Pembalikan)/kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai	(125,080,066)	624,202,406
Reklasifikasi ke piutang bermasalah	<u>-</u>	<u>(562,225,073)</u>
Saldo akhir	<u>5,879,641,014</u>	<u>6,004,721,080</u>

Kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai diakui pada beban penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman dan untuk pembalikan penyisihan kerugian penurunan nilai diakui pada pendapatan lain-lain dalam laporan aktivitas.

Perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

2019				
<u>Kualitas Pinjaman</u>	<u>Umur Piutang</u>	<u>Saldo Piutang</u>	<u>Persentase Penyisihan</u>	<u>Alokasi Penyisihan</u>
Lancar	180 - 270 hari	48,089,000	0.07%	34,03
Macet	> 270 hari	5,879,606,975	100.00%	5,879,606,975
Jumlah		<u>5,927,695,975</u>		<u>5,879,641,014</u>

2018				
<u>Kualitas Pinjaman</u>	<u>Umur Piutang</u>	<u>Saldo Piutang</u>	<u>Persentase Penyisihan</u>	<u>Alokasi Penyisihan</u>
Diragukan	180 - 270 hari	35,500,000	32.04%	11,374,177
Macet	> 270 hari	5,993,346,903	100.00%	5,993,346,903
Jumlah		<u>6,028,846,903</u>		<u>6,004,721,080</u>

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Halaman 4/9

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

Analisis saldo piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan sektor adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sektor peternakan	3,242,558,300	3,242,558,300
Sektor industri	1,920,184,282	1,947,685,948
Sektor jasa	447,861,634	503,924,228
Sektor perdagangan	270,290,092	287,876,760
Sektor perkebunan	11,041,000	11,041,000
Sektor lain	<u>35,760,667</u>	<u>35,760,667</u>
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan	5,927,695,975	6,028,846,903
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(5,879,641,014)</u>	<u>(6,004,721,080)</u>
Piutang pinjaman mitra binaan, neto	<u>48,054,961</u>	<u>24,125,823</u>

Analisis saldo piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sumatera Selatan	2,174,770,334	2,174,770,334
Jawa Barat	858,633,273	858,933,273
D.I. Yogyakarta	803,048,022	824,458,022
Lampung	715,440,000	719,890,000
Jawa Tengah	548,573,166	604,553,761
Jawa Timur	377,481,446	380,181,446
DKI Jakarta	219,664,227	234,072,560
Sumatera Utara	104,950,000	105,770,000
Riau	91,557,219	92,557,219
Banten	<u>33,578,288</u>	<u>33,660,288</u>
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan	5,927,695,975	6,028,846,903
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(5,879,641,014)</u>	<u>(6,004,721,080)</u>
Piutang pinjaman mitra binaan, neto	<u>48,054,961</u>	<u>24,125,823</u>

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**
Halaman 4/10
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain terdiri atas piutang jasa administrasi atas pinjaman yang sudah jatuh tempo dan piutang pengembalian sisa dana penyaluran Bina Lingkungan dari BUMN lain.

Saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Piutang jasa administrasi	818,846,935	843,631,935
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(818,632,087)</u>	<u>(819,984,892)</u>
Piutang jasa administrasi, neto	<u>214,848</u>	<u>23,647,043</u>

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang jasa administrasi adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo awal	819,984,892	94,465,950
Pemulihan penyisihan atas pembayaran	(1,725,352)	-
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>372,547</u>	<u>725,518,942</u>
Saldo akhir	<u>818,632,087</u>	<u>819,984,892</u>

Penyisihan kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman dan untuk pemulihan penyisihan diakui pada pendapatan lain-lain pada laporan aktivitas.

8. PIUTANG PINJAMAN BERMASALAH

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
PT Sang Hyang Seri (Persero) ("SHS")	73,715,000,000	73,715,000,000
PT Pertani (Persero) ("Pertani")	37,523,000,000	38,723,000,000
Mitra binaan	<u>49,272,098,148</u>	<u>49,841,183,474</u>
	160,510,098,148	162,279,183,474
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(160,510,098,148)</u>	<u>(162,279,183,474)</u>
Piutang pinjaman bermasalah, neto	<u>-</u>	<u>-</u>

Mutasi piutang bermasalah selama tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo awal	162,279,183,474	164,525,370,622
Pembayaran piutang pinjaman bermasalah	(1,283,559,000)	(1,366,705,295)
Reklasifikasi dari angsuran belum teridentifikasi	(489,748,326)	(357,774,070)
Reklasifikasi dari piutang pinjaman mitra binaan	4,222,000	562,225,073
Hapus buku piutang pinjaman bermasalah	<u>-</u>	<u>(1,083,932,856)</u>
Saldo akhir	<u>160,510,098,148</u>	<u>162,279,183,474</u>

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Halaman 4/11

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

8. PIUTANG PINJAMAN BERMASALAH (lanjutan)**Pinjaman kepada SHS**

PKBL memberikan pinjaman kepada SHS sejumlah Rp80.000.000.000 pada tahun 2012 dalam rangka pelaksanaan sinergi BUMN pada Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Pinjaman tersebut dikenakan jasa administrasi sebesar 6% per tahun dan semula akan dilunasi secara bertahap selama tahun 2013. Pada tanggal 13 Desember 2013, PGN menyetujui permohonan SHS untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman (*rescheduling*) sampai dengan tahun 2016. Saldo piutang pinjaman kepada SHS pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diklasifikasikan sebagai piutang bermasalah karena PKBL berpendapat bahwa piutang tersebut sudah tidak dapat tertagih.

Pinjaman kepada Pertani

Pada tahun 2012, PKBL memberikan pinjaman kepada Pertani sejumlah Rp77.000.000.000 dalam rangka pelaksanaan sinergi BUMN pada GP3K. Pinjaman tersebut dikenakan jasa administrasi sebesar 6% per tahun dan semula akan dilunasi secara bertahap selama tahun 2013. Pada tanggal 13 Desember 2013, PKBL menyetujui permohonan Pertani untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman sampai dengan bulan April 2014, kemudian menyetujui rekondisi pada tanggal 30 Juni 2014. Saldo piutang pinjaman kepada Pertani pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diklasifikasikan sebagai piutang bermasalah karena PKBL berpendapat bahwa piutang tersebut sudah tidak dapat tertagih.

Saldo piutang bermasalah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan industri adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sektor pertanian	113,226,079,043	114,440,829,043
Sektor perdagangan	16,991,512,539	17,293,499,004
Sektor jasa	13,527,625,692	13,619,102,359
Sektor industri	12,168,568,833	12,344,616,583
Sektor peternakan	2,118,808,013	2,121,422,457
Sektor perikanan	933,361,334	934,171,334
Sektor perkebunan	204,395,416	204,395,416
Sektor lain	<u>1,339,747,278</u>	<u>1,321,147,278</u>
	160,510,098,148	162,279,183,474
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(160,510,098,148)</u>	<u>(162,279,183,474)</u>
Piutang pinjaman bermasalah, neto	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Halaman 4/12

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**
(Dinyatakan dalam Rupiah)

9. PENDAPATAN

	2019		
	Program Kemitraan	Program Bina Lingkungan	Jumlah
Jasa giro	1,438,875,572	1,944,848	1,440,820,420
Jasa administrasi pinjaman	252,634,489	-	252,634,489
Pendapatan lain-lain	2,856,399,350	-	2,856,399,350
Jumlah	4,547,909,411	1,944,848	4,549,854,259

	2018		
	Program Kemitraan	Program Bina Lingkungan	Jumlah
Jasa giro	3,556,329,964	2,839,869	3,559,169,833
Jasa administrasi pinjaman	289,648,722	-	289,648,722
Pendapatan lain-lain	3,071,365,172	-	3,071,365,172
Jumlah	6,917,343,858	2,839,869	6,920,183,727

Termasuk dalam pendapatan lain-lain di 2019 adalah pengembalian dari pinjaman piutang bermasalah senilai Rp1.283.559.000 (2018: Rp1.366.705.295).

10. PENYALURAN DANA BINA LINGKUNGAN

Penyaluran dana bina lingkungan dilakukan kepada sektor-sektor berikut:

	2019	2018
Pendidikan	90,000,000	-
Kesehatan	10,000,000	-
Sarana dan/atau prasarana umum	300,060	-
Jumlah	100,300,060	-

11. PENYALURAN DANA MELALUI BUMN KHUSUS

Pada tanggal 9 Mei 2019, PKBL PGN melakukan penyaluran Dana Kemitraan melalui PT Permodalan Nasional Madani (Persero) ("PT PNM") berdasarkan surat dari Menteri BUMN RI No. S-822/MBU/12/2018. Penetapan PT PNM sebagai BUMN Khusus yang akan menyalurkan dana Program Kemitraan BUMN merupakan bentuk tindak lanjut pelaksanaan Bab IV Permen BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.

	2019	2018
PT PNM	177,974,635,344	-
Jumlah	177,974,635,344	-

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Halaman 4/13

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

12. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PIUTANG PINJAMAN

Rincian atas beban penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Penyisihan kerugian penurunan nilai - BUMN penyalur (Catatan 5)	3,983,613,450	271,049,066
Penyisihan kerugian penurunan nilai - piutang lain-lain (Catatan 7)	372,547	725,518,942
Penyisihan kerugian penurunan nilai - piutang mitra binaan (Catatan 6)	-	624,202,406
Jumlah	<u>3,983,985,997</u>	<u>1,620,770,414</u>

13. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI

Selama tahun 2019 dan 2018, PKBL melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak dan sifat dari transaksi-transaksi pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

Pihak berelasi	Sifat hubungan	Transaksi
BRI, BNI, Bank Mandiri	Entitas dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia	Penempatan dana pada rekening bank
PTPN IX, PT Garam, SHS, Pertani	Entitas dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia	Kerja sama penyaluran dana Program Kemitraan
PT PNM	Entitas dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia	Kerja sama penyaluran dana melalui BUMN khusus
Rincian transaksi dan saldo dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:		
		<u>2019</u> <u>2018</u>
Jasa administrasi pinjaman PTPN IX dan Garam		<u>252,634,489</u> <u>289,648,722</u>
Pengembalian piutang pinjaman dari BUMN penyalur dan piutang bermasalah PTPN IX dan Garam SHS dan Pertani		1,805,552,671 3,166,664,004 <u>1,200,000,000</u> <u>1,260,000,000</u> <u>3,005,552,671</u> <u>4,426,664,004</u>
Pendapatan jasa giro BRI BNI Bank Mandiri		1,438,875,572 3,557,357,942 1,944,848 1,763,799 <u>-</u> <u>48,092</u> <u>1,440,820,420</u> <u>3,559,169,833</u>

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Halaman 4/14

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

13. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Penyaluran dana melalui BUMN khusus PT PMN	177,974,635,344	-
Aset		
Kas dan setara kas (Catatan 4)	9,325,637,681	182,062,007,969
Piutang bermasalah* (Catatan 8)	111,238,000,000	112,438,000,000
Piutang BUMN penyalur* (Catatan 5)	8,911,884,434	10,717,437,105
	<u>129,475,522,115</u>	<u>305,217,445,074</u>

*) Saldo sebelum penyisihan kerugian penurunan nilai piutang

Ikhtisar
Kinerja PKBL

Pendahuluan

PKBL dan
Pembangunan
Berkelanjutan

Pelaksanaan
Program PKBL

Kerjasama
Penyaluran
PKBL

Temuan Auditor
dan Keputusan
RUPS

Lampiran -
Lampiran

Laporan
Auditor
Independen

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20
Jakarta 11140, Indonesia
T +6221 633 4838
F +6221 633 3080
www.pgn.co.id

Contact Center
T 1500 645
E contact.center@pgn.co.id
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20
Jakarta 11140, Indonesia